



RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan daerah guna meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu disusun rencana strategis perangkat daerah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam perencanaan strategis perangkat daerah ditetapkan Peraturan Bupati setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21) tetap digunakan sebagai Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 56);
- b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025

BUPATI GUNUNGKIDUL

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR 35.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
1.4 Sistematika Penulisan	I-4
BAB II	
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-1
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	II-10
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-11
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	II-25
2.1.5 Mitra Kerja Perangkat Daerah	II-26
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II-27
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	II-27
2.2.2 Isu Strategis	II-28
BAB III TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah	III-1
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah	III-3
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ...	III-8
3.4 Arah Kebijakan Perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	III-10
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-1
4.1 Uraian Program	IV-1
4.2 Uraian Kegiatan	IV-2
4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan Pagu indikatif	IV-42
4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Prioritas Pembangunan Daerah	IV-83
4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	IV-93
4.6 Target keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	IV-100
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-10
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul	II-13
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten	II-14
Tabel 2.4 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	II-34
Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	III-7
Tabel 3.2 Strategi Perangkat Daerah	III-8
Tabel 3.3 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah	III-9
Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra	III-10
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/Subkegiatan Rancangan Awal Renstra	IV-4
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	IV-42
Tabel 4.3 Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah	IV-83
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	IV-94
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci	IV-101

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul.....	II-9
Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah	III-5
Gambar 3.2 Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra Perangkat Daerah	III-5
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	IV-2

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS
PENBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
KALURAHAN PENGENDALAIN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2025 - 2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daaaerah dan dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangak Menenga Daerah. Selain itu, Rencana Strategis juga memberikan fokus terhadap isu-isu penting dan strategis yang dihadapi oleh organisasi serta membantu dalam menghadapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan strategis tersebut. Selanjutnya, proses penyusunan Rencana Strategis mempertimbangkan potensi sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan strategis yang telah teridentifikasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya telah diterbitkan, terlihat suatu upaya pemerintah (pusat) dalam mencanangkan perubahan paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan bersasaran. Perubahan tersebut diantaranya menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan. Sebagai amanat atas kewajiban perangkat daerah tersebut, antara lain terurai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 Ayat 1 bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”.

Dalam uraian lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai “RENSTRA-SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun” Proses penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan. Adapun tahapan penyusunan Renstra antara lain persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Perumusan sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah dirumuskan dalam penyusunan RKPD berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, program pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan pembangunan Daerah lainnya. Sasaran Renstra Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Gunungkidul sebagai salah satu Perangkat Daerah teknis yang diberi tugas oleh Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah lainnya dalam wilayah kerja. Rencana Strategis ini dibuat sebagai petunjuk dan penentu arah, sasaran, tujuan, serta cara bagaimana mandat yang telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilaksanakan dengan baik, dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Gunungkidul. Keterkaitan antara Renstra Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya adalah bahwa Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten untuk setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah yang dikoordinir oleh BAPPEDA. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah ini perlu disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Yang menjadi landasan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul adalah :

1. Undang-undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

- Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 116);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
 13. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor : 24 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

- Sebagai pedoman untuk merealisasikan sasaran RPJMD terutama terkait dengan urusan pemberdayaan masyarakat di Kalurahan, serta keluarga berencana melalui penentuan target kinerja serta prioritas program dan kegiatan jangka menengah.
- Sebagai salah satu dasar pembinaan dan pengendalian program/kegiatan tahun 2025 samapai dengan tahun 2029.

b. Tujuan

- Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah
- Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- Memberikan pedoman bagi aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4. Kelompok sasaran layanan Perangkat Daerah
 - 2.1.5. Mitra Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah
- 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program
- 4.2 Uraian Kegiatan
- 4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan Pagu indikatif
- 4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
- 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKU) Perangkat Daerah
- 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan instansi pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan. Dengan memberikan pelayanan melalui urusan yang menjadi tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

a. Tugas

Adapun yang menjadi ketugasan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi dua bidang yaitu:

1. Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan.

Pelayanan difokuskan pada peningkatan kapasitas aparatur kalurahan, penguatan lembaga kemasyarakatan, serta fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan Kalurahan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi mitra aktif bagi pemerintahan kalurahan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, perencanaan pembangunan partisipatif, dan pelaporan yang transparan.

2. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Pengendalian Penduduk

Pengendalian penduduk dan pelaksanaan program Keluarga Berencana di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKPPKB) memiliki peran strategis dalam mengelola isu-isu kependudukan melalui pendekatan yang menyeluruh dan berbasis masyarakat.

- Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

Pelayanan KB menjadi salah satu prioritas utama, dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. DPMKPPKB memberikan akses yang luas dan merata terhadap berbagai jenis alat dan metode kontrasepsi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Layanan KB dilakukan melalui fasilitas kesehatan, kampung KB, serta melalui kegiatan mobile clinic dan pelayanan KB gratis di berbagai momentum pelayanan terpadu.

b. Fungsi

Berdasarkan Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah unsur pendukung tugas Bupati urusan bidang

pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan, urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan umum di bidang di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan partisipasi, komunikasi, informasi, dan edukasi keluarga berencana;
5. pelaksanaan pembinaan kelembagaan, partisipasi, sarana, dan prasarana serta usaha ekonomi desa dan masyarakat;
6. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah Kalurahan;
7. pelaksanaan pembinaan perencanaan, keuangan, dan kekayaan Kalurahan;
8. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas;
9. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
10. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
11. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
12. pengelolaan kesekretariatan Dinas; dan
13. pengelolaan UPT.

b.1. Pengelolaan kesekretariatan dinas

Sedangkan fungsi dari sekretaris dan bidang-bidang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

b.1.1. Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- 1.) penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
- 2.) pengoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Kalurahan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- 3.) pengoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran Dinas;
- 4.) pengoordinasian pelaksanaan tugas Unit Organisasi di lingkungan Dinas;
- 5.) penyusunan rencana kerja sama;
- 6.) penyusunan perjanjian kinerja Dinas;
- 7.) penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;
- 8.) pelaksanaan analisis dan penyajian data di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Kalurahan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- 9.) penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Kalurahan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- 10.) pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;
- 11.) penyusunan laporan kinerja Dinas;
- 12.) pelaksanaan tugas bidang perencanaan, meliputi:
 - pelaksanaan analisis dan penyajian data;
 - pengelolaan sistem informasi, pelayanan data, dan informasi pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Kalurahan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
 - penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran Dinas;
 - penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - penyiapan bahan pengendalian kegiatan Dinas;
 - penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas; dan
 - penyusunan laporan kinerja Dinas;
- 13.) pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas;
- 14.) pengoordinasian pelaksanaan pengendalian intern Dinas;
- 15.) penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- 16.) penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Dinas;

- 17.) penyiapan bahan dan penatausahaan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Kalurahan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- 18.) pengelolaan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;
- 19.) pelayanan administratif dan fungsional;
- 20.) penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan;
- 21.) pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Sekretariat;
- 22.) penyelenggaraan sistem pengendalian intern Sekretariat; dan
- 23.) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat.

b.1.2. Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- 1.) penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum;
- 2.) penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian Umum;
- 3.) pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan;
- 4.) pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- 5.) pengoordinasian pelaksanaan pengendalian intern Dinas;
- 6.) penyusunan rincian tugas Dinas;
- 7.) pengelolaan urusan rumah tangga;
- 8.) pengelolaan barang milik Daerah;
- 9.) pengelolaan perpustakaan Dinas;
- 10.) pelaksanaan hubungan masyarakat;
- 11.) penyusunan rencana kerja sama;
- 12.) pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik Dinas;
- 13.) pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
- 14.) pengelolaan perjalanan Dinas;
- 15.) pelaksanaan analisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai;
- 16.) pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
- 17.) pelaksanaan pengembangan pegawai;
- 18.) penyelenggaraan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- 19.) penyiapan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai;
- 20.) pelaksanaan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;
- 21.) penyiapan bahan evaluasi kinerja pegawai;

- 22.) pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Subbagian Umum;
- 23.) penyelenggaraan sistem pengendalian intern Subbagian Umum;
- 24.) penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi umum; dan
- 25.) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum.

b.1.3. Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- 1.) penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
- 2.) penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian Keuangan;
- 3.) pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan Dinas;
- 4.) penyusunan laporan keuangan;
- 5.) pengelolaan administrasi pendapatan;
- 6.) penyiapan bahan perhitungan anggaran Dinas;
- 7.) pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Subbagian Keuangan;
- 8.) penyelenggaraan sistem pengendalian intern Subbagian Keuangan;
- 9.) penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi keuangan; dan
- 10.) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan.

b.2. Bidang Bina Administrasi dan Aparatur Pemerintah Kalurahan mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kegiatan Bidang Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Kalurahan;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi dan aparatur pemerintahan Kalurahan;
3. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Bidang Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Kalurahan;
4. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan Kalurahan;
5. pelaksanaan tugas bidang bina administrasi pemerintahan Kalurahan, meliputi:
 - pembinaan dan faslitasi penyusunan produk hukum Kalurahan;
 - pembinaan dan fasilitasi penyusunan dokumen administrasi pemerintah Kalurahan;
 - pembinaan dan fasilitasi penetapan batas wilayah Kalurahan;
 - pembinaan dan fasilitasi pembentukan, pemekaran, penggabungan, dan penghapusan

- Kalurahan/padukuhan; dan
- pembinaan dan fasilitasi kerjasama Kalurahan;
- 6. pelaksanaan tugas bidang bina aparatur pemerintahan Kalurahan, meliputi:
 - pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemilihan, pembinaan, peningkatan kapasitas, dan fasilitasi pendampingan permasalahan Lurah;
 - pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengisian, pembinaan, peningkatan kapasitas, dan fasilitasi pendampingan permasalahan Pamong dan Staf Pamong Kalurahan;
 - Pembinaan dan fasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, dan informasi penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan tahunan dan akhir masa jabatan lurah;
 - fasilitasi/pendampingan pemilihan lurah antar waktu melalui musyawarah Kalurahan;
 - pembinaan kesejahteraan aparatur pemerintahan Kalurahan;
 - pembinaan permasalahan perkawinan lurah dan/atau pamong Kalurahan; dan
 - pembinaan anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan meliputi pengisian, peningkatan kapasitas, pendampingan permasalahan, pergantian anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan antar waktu;
 - pembinaan dan fasilitasi penyusunan laporan kinerja badan permasyarakatan Kalurahan;
- 7. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Bidang Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Kalurahan;
- 8. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Bidang Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Kalurahan;
- 9. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi dan aparatur pemerintahan Kalurahan; dan
- 10. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Kalurahan.

b.3. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

1. Penyusun rencana kegiatan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
3. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang perlindungan anak dan keluarga berencana
4. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan partisipasi komunikasi, informasi dan edukasi

keluarga berencana

5. Penyelenggaraan system pengendalian intern di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
6. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana

b.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat;
3. Penyusunan rencana kinerja dan penetapan kinerja di bidang pemberdayaan masyarakat;
4. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan, partisipasi, sarana dan prasarana serta usaha ekonomi desa dan masyarakat;
5. Pengorganisasian reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat;
6. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang pemberdayaan masyarakat
7. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pemberdayaan masyarakat
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat

b.5. Bidang Bina Perencanaan, Keuangan dan Kekayaan Kalurahan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan bidang Perencanaan, Keuangan dan Kekayaan Kalurahan;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Keuangan dan Kekayaan Kalurahan;
3. Penyusunan rencana kinerja dan dan perjanjian kinerja di bidang Perencanaan, Keuangan dan Kekayaan Kalurahan;
4. Pelaksanaan pembinaan perencanaan, pengelolaan keuangan, Kekayaan Pemerintah Kalurahan;
5. Pengorganisasian reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan bidang Perencanaan, Keuangan dan Kekayaan Kalurahan;
6. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang Perencanaan, Keuangan dan Kekayaan Kalurahan;
7. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang Perencanaan, Keuangan dan Kekayaan Kalurahan;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang Perencanaan, Keuangan dan Kekayaan Kalurahan;

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan secara administratif dibantu oleh Sekretaris, 2 Subbagian dan secara teknis dibantu oleh 4 Kepala Bidang serta tenaga fungsional.

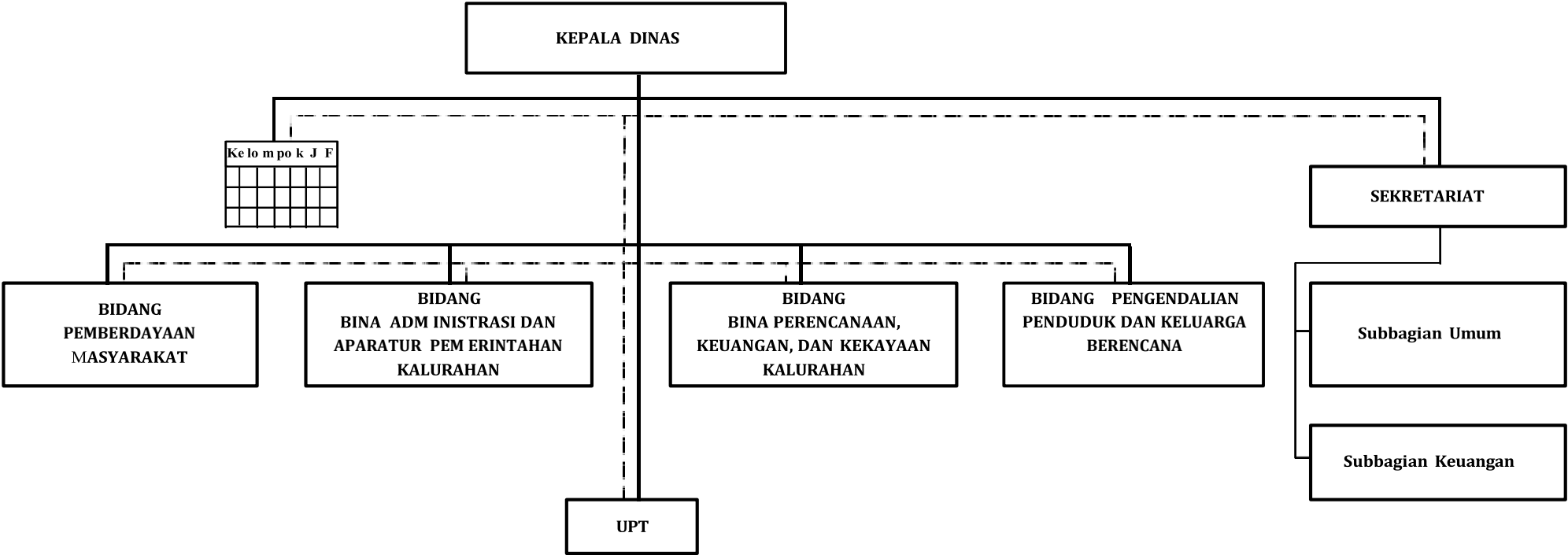
Ruang lingkup tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana teknis selalu berkaitan dengan sektor pembangunan yang langsung menyentuh pada kepentingan masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tergantung dari kelancaran koordinasi baik intern Dinas maupun ekstern (Badan/Dinas Instansi terkait) lain. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari:
 - Subbagian Keuangan
 - Subbagian Umum
3. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. Bidang Bina Administrasi dan Aparatur Pemerintah Kalurahna
5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6. UPT, dan
7. Tenaga Fungsional

Bahwa sesuai Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah, maka Struktur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul adalah sebagaimana tersebut dalam Gambar 1 berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 34 pegawai, dengan rincian sebagai berikut:

a.1 Berdasarkan Jabatan

- Struktural

- 1. Esselon II : 1 orang
- 2. Esselon III : 5 orang
- 3. Esselon IV : 2 orang

- Non Struktural : 14 orang

- Fungsional : 5 orang

a.2 Berdasarkan Pangkat/Golongan

- 1. Golongan IV : 5 orang
- 2. Golongan III : 17 orang
- 3. Golongan II : 3 orang
- 4. Golongan I : 0 orang

a.3 Berdasarkan Pendidikan

- 1. S2 : 7 orang
- 2. S1/ D4 : 13 orang
- 3. D3 : 2 orang
- 4. SLTA : 5 orang

b. Sarana Prasarana

Penyajian profil aset yang berisikan informasi singkat tentang kondisi eksisting aset di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai upaya untuk memanfaatkan aset daerah secara optimal. Pengelolaan aset ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Melihat pada kondisi aset yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana saat ini secara Kwantitas cukup memadai tetapi dari sisi kualitas kurang, sehingga untuk mendukung operasional kegiatan kurang optimal. Adapun secara rinci kondisi sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jenis	Objek	Nama Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
		Aset Tetap	2,243	17.907.189.996,60
1		Tanah	3	2.835.000,00
1	1	Tanah	3	2.835.000,00
2		Peralatan Dan Mesin	2,206	7.481.362.210,60
2	1	Alat Angkutan	111	3.245.608.649,60
2	2	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	10	530.485.125,00
2	3	Alat Pertanian	20	14.792.250,00

Jenis	Objek	Nama Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
2	4	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	1,752	2.210.431.506,00
2	5	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	78	278.625.800,00
2	6	Alat Laboratorium	1	2.500.000,00
2	7	Komputer	224	1.194.958.880,00
2	8	Peralatan Proses/Produksi	10	3.960.000,00
3		Gedung Dan Bangunan	29	10.235.611.786,00
3	1	Bangunan Gedung	24	9.686.036.786,00
3	2	Tugu Titik Kontrol/Pasti	5	549.575.000,00
4		Jalan, Jaringan Dan Irigasi	5	147.631.000,00
4	1	Instalasi	2	42.412.000,00
4	2	Jaringan	3	105.219.000,00
5		Aset Lainnya	13	39.750.000,00
5	1	Aset Tidak Berwujud	13	39.750.000,00
		Total	2,256	17.907.189.996,60

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Uraian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 berupa analisis gambaran pelayanan yang diharapkan mampu mengidentifikasi :

1. Tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana periode sebelumnya sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Potensi dan permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
3. Potensi dan permasalahan aspek pengelolaan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat semakin efektif dengan adanya peluncuran Dana Desa mulai tahun 2015 berdasar Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa ini sangat bermanfaat bagi masyarakat pedesaan yang bisa dibelanjakan berdasar prioritas sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT RI yang diatur setiap tahunnya sesuai kebutuhan di lapangan, ditandai dengan percepatan pembangunan sarana prasarana infrastruktur pedesaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sedangkan kegiatan fasilitasi TMMD dan Karya Bhakti masih dapat dilaksanakan sehingga partisipasi dan swadaya masyarakat masih cukup tinggi dalam kegiatan pembangunan Kalurahan.

Capaian sasaran penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang keluarga berencana, dilaksanakan dengan berbagai kegiatan antara lain:, penyediaan

pelayanan KB dan kontrasepsi bagi keluarga miskin, pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), pembinaan keluarga berencana, pembinaan kader kesehatan dan keluarga berencana, konsolidasi dan pembinaan usaha peningkatan pendapatan keluarga (UPPKS), pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB, pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja, program kesehatan reproduksi remaja advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR).

Adapun Pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tersaji dalam tabel 2.2 dan tabel 2.3

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2021-2025

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase kalurahan yang melaporkan LPPKal tepat waktu				75.00%	80%	85%	90%	95%	75.00%	80.00%	84.7%	90.3%	95%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	persentase desa mandiri				13.89%	17.36%	20.83%	24.31%	27.78%	13.89%	29.16%	46.50%	87.50%	97.22%	1.00	1.68	2.23	3.60	3.50
3	Nilai AKIP PD				76.11	78.11	80.11	82.11	85.3	77.11	75.17	83.9	82.99	83.97	1.01	0.96	1.05	1.01	0.98
4	persentase pemakaian alat kontrasepsi modern				78.08%	78.10%	78.12%	78.14%	78.16%	78.08%	99.07%	72.47%	70.39%	70.39%	1.00	1.27	0.93	0.90	0.90
5	Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif				78.24%	78.50%	78.60%	78.70%	78.80%	78.24%	67.58%	72.95%	71.12%	71.12%	1.00	0.86	0.93	0.90	0.90
6	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak tidak terpenuhi (Unmet Need)				8.39%	8.33%	8.30%	8.25%	8.20%	8.35%	22.00%	12.0%	9.38%	8.24%	1.00	2.64	1.45	1.14	1.00
7	Cakupan Anggota Bina keluarga Balita (BKB)				75.20%	75.22%	75.24%	75.26%	75.28%	75.20%	9.10%	14%	12.69%	12.69%	1.00	0.12	0.18	0.17	0.17
8	Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB				67.70%	67.80%	67.90%	68.00%	68.10%	67.70%	69.02%	32.08%	37.35%	37.35%	1.00	1.02	0.47	0.55	0.55
9	Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKP)				0.40	0.38	0.38	0.39	0.40	0.40	0.33	0.29	0.28	30.00	1.00	0.87	0.76	0.73	75.79

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul

Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	4,426,762,405	4,333,628,877	3,010,428,204	2,877,907,941	3,325,799,377	3,944,623,911	4,268,354,378	2,890,069,514	2,720,124,709	3,325,799,377	0.89	0.98	0.96	0.95	1.00	(275,240,757)	(154,706,134)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35,440,000	36,985,000	53,697,900	55,845,400	64,038,200	32,070,000	36,985,000	53,697,677	55,845,302	64,038,200	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00	7,149,550	7,992,050
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9,175,000	28,410,000	33,774,900	38,052,400	45,380,000	8,675,000	28,410,000	33,774,802	38,052,302	45,380,000	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00	9,051,250	9,176,250
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18,583,750	893,750	2,375,000	2,305,000	2,305,000	15,713,750	893,750	2,374,961	2,305,000	2,305,000	0.85	1.00	1.00	1.00	1.00	(4,069,688)	(3,352,188)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	893,750	893,750	1,940,000	1,955,000	2,225,000	893,750	893,750	1,940,000	1,955,000	2,225,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	332,813	332,813
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	893,750	893,750.00	2,290,000	1,925,000	1,925,000	893,750	893,750.00	2,290,000	1,925,000	1,925,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	257,813	257,813
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	893,750	893,750.00	2,015,000	1,880,000	2,475,200	893,750	893,750.00	2,015,000	1,880,000	2,475,200	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	395,363	395,363
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			7,725,000	5,975,000	5,975,000			7,724,914	5,975,000	5,975,000			1.00	1.00	1.00	1,493,750	1,493,750
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,000,000	5,000,000.00	3,578,000	3,753,000	3,753,000	5,000,000	5,000,000.00	3,578,000	3,753,000	3,753,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	(311,750)	(311,750)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,876,394,905	3,612,744,877	2,254,977,704	2,019,500,541	2,220,002,932	3,476,122,607	3,563,919,610	2,192,649,957	1,961,556,768	2,220,002,932	0.90	0.99	0.97	0.97	1.00	(414,097,993)	(314,029,919)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,870,294,905	3,584,509,877	2,216,187,704	1,978,724,741	2,171,967,932	3,470,022,607	3,535,684,610	2,153,859,990	1,920,800,968	2,171,967,932	0.90	0.99	0.97	0.97	1.00	(424,581,743)	(324,513,669)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,400,000	3,000,000	5,130,000	2,110,000	2,090,000	1,400,000	3,000,000	5,130,000	2,110,000	2,090,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	172,500	172,500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4,700,000	25,235,000	33,660,000	38,665,800	45,945,000	4,700,000	25,235,000	33,659,967	38,645,800	45,945,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10,311,250	10,311,250
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	8,600,000	14,750,000	28,741,900	45,336,200	-	8,600,000	14,750,000	24,393,549	45,336,200	0.00	1.00	1.00	0.85	1.00	11,334,050	11,334,050

Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	4,600,000	14,750,000	28,741,900	45,336,200	-	4,600,000	14,750,000	24,393,549	45,336,200	0.00	1.00	1.00	0.85	1.00	11,334,050	11,334,050
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	4,000,000				-	4,000,000				0.00	1.00				-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	151,420,000	181,239,000	190,485,100	290,721,300	303,232,800	124,817,523	180,423,744	158,736,943	226,706,016	303,232,800	0.82	1.00	0.83	0.78	1.00	37,953,200	44,603,819
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,335,000	9,335,000	9,334,200	6,370,000	9,312,800	9,335,000	9,335,000	9,334,200	6,370,000	9,312,800	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	(5,550)	(5,550)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64,830,000	100,000,000	67,731,000	73,492,500	75,275,000	64,830,000	99,665,000	67,731,000	73,492,500	75,275,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2,611,250	2,611,250
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14,365,000	14,365,000	13,165,000	3,394,000	5,720,000	14,365,000	14,365,000	13,165,000	3,394,000	5,720,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	(2,161,250)	(2,161,250)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17,600,000	17,600,000	20,330,900	12,572,300	15,044,000	17,600,000	17,600,000	20,330,900	12,572,300	15,044,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	(639,000)	(639,000)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,200,000	1,200,000	1,080,000	1,200,000	1,200,000	1,000,000	720,000	1,080,000	1,080,000	1,200,000	0.83	0.60	1.00	0.90	1.00	-	50,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu			3,500,000	4,200,000	4,200,000			3,500,000	4,200,000	4,200,000			1.00	1.00	1.00	1,050,000	1,050,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44,090,000	38,739,000	75,344,000	158,776,000	160,432,000	17,687,523	38,738,744	43,595,843	94,880,716	160,432,000	0.40	1.00	0.58	0.60	1.00	29,085,500	35,686,119
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				30,716,500	32,049,000				30,716,500	32,049,000				1.00	1.00	8,012,250	8,012,250
Pengadaan Barang Milik Daerah					67,102,000					67,102,000					1.00	16,775,500	16,775,500
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
Pengadaan Mebel					6,402,000					6,402,000					1.00	1,600,500	1,600,500
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					30,700,000					30,700,000					1.00	7,675,000	7,675,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					30,000,000					30,000,000					1.00	7,500,000	7,500,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125,307,500	137,397,500	164,742,500	175,632,000	188,549,125	90,095,681	122,086,110	139,304,937	175,632,000	188,549,125	0.72	0.89	0.85	1.00	1.00	15,810,406	24,613,361
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,320,000	24,717,500	23,540,000	5,433,000	3,000,000	1,315,000	24,717,500	23,540,000	5,433,000	3,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	420,000	421,250
Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	90,347,500	78,600,000	100,962,500	104,598,500	110,399,125	55,140,681	63,323,610	75,524,937	104,598,500	110,399,125	0.61	0.81	0.75	1.00	1.00	5,012,906	13,814,611

Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33,640,000	34,080,000	40,240,000	65,600,500	75,150,000	33,640,000	34,045,000	40,240,000	65,600,500	75,150,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10,377,500	10,377,500
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	236,200,000	354,662,500	331,775,000	307,466,800	437,538,120	219,518,100	354,339,914	330,930,000	307,428,500	437,538,120	0.93	1.00	1.00	1.00	1.00	50,334,530	54,505,005
Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	176,880,000	184,407,500	218,750,000	216,612,500	216,100,000	160,315,100	184,284,914	218,750,000	216,612,500	216,100,000	0.91	1.00	1.00	1.00	1.00	9,805,000	13,946,225
Pemeliharaan Mebel			-	1,000,000	2,200,000			-	1,000,000	2,200,000				1.00	1.00	550,000	550,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,000,000	25,200,000	12,750,000	7,090,000	11,150,000	14,000,000	25,200,000	11,905,000	7,090,000	11,150,000	1.00	1.00	0.93	1.00	1.00	(712,500)	(712,500)
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36,320,000	136,055,000	95,775,000	79,764,300	205,088,120	36,203,000	135,855,000	95,775,000	79,726,000	205,088,120	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	42,192,030	42,221,280
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9,000,000	9,000,000	4,500,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000	9,000,000	4,500,000	3,000,000	3,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	(1,500,000)	(1,500,000)
Penataan Organisasi	2,000,000	2,000,000				2,000,000	2,000,000				1.00	1.00				(500,000)	(500,000)
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2,000,000	2,000,000				2,000,000	2,000,000				1.00	1.00				(500,000)	(500,000)
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	2,000,000	9,700,000	3,190,000	8,910,000	8,730,000	2,000,000	9,700,000	3,190,000	8,829,883	8,730,000	1.00	1.00	1.00	0.99	1.00	1,682,500	1,682,500
Fasilitasi Kerja sama antar Desa	2,000,000	9,700,000	3,190,000	8,910,000	8,730,000	2,000,000	9,700,000	3,190,000	8,829,883	8,730,000	1.00	1.00	1.00	0.99	1.00	1,682,500	1,682,500
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2,000,000	9,700,000	3,190,000	8,910,000	8,730,000	2,000,000	9,700,000	3,190,000	8,829,883	8,730,000	1.00	1.00	1.00	0.99	1.00	1,682,500	1,682,500
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3,651,601,400	3,284,811,900	3,596,956,100	3,727,950,600	3,445,361,600	3,500,590,676	3,183,268,540	3,510,267,556	3,549,161,440	3,445,361,600	0.96	0.97	0.98	0.95	1.00	(51,559,950)	(13,807,269)
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3,651,601,400	3,284,811,900	3,596,956,100	3,727,950,600	3,445,361,600	3,500,590,676	3,183,268,540	3,510,267,556	3,549,161,440	3,445,361,600	0.96	0.97	0.98	0.95	1.00	(51,559,950)	(13,807,269)
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2,714,436,400	2,773,286,400	3,042,576,100	15,224,900	35,204,900	2,621,887,776	2,683,788,040	2,985,697,215	14,564,900	35,204,900	0.97	0.97	0.98	0.96	1.00	(669,807,875)	(646,670,719)
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	485,050,000	15,100,000	17,287,200	6,000,000	6,000,000	460,597,500	10,640,000	13,597,500	4,600,000	6,000,000	0.95	0.70	0.79	0.77	1.00	(119,762,500)	(113,649,375)

Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	10,650,000	26,900,000	19,300,000	18,260,000	18,210,000	10,650,000	26,540,000	19,299,146	18,258,951	18,210,000	1.00	0.99	1.00	1.00	1.00	1,890,000	1,890,000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	40,000,000	94,585,000	74,860,000	50,912,500	34,780,000	36,600,000	92,200,000	74,859,370	50,761,969	34,780,000	0.92	0.97	1.00	1.00	1.00	(1,305,000)	(455,000)
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			10,500,000	31,327,500	34,415,000			10,250,000	31,327,500	34,415,000			0.98	1.00	1.00	8,603,750	8,603,750
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa			6,801,000	1,500,000	1,500,000			6,801,000	1,500,000	1,500,000			1.00	1.00	1.00	375,000	375,000
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	52,090,000	164,140,000	27,729,800	10,550,000	35,750,000	52,090,000	164,140,000	27,729,443	10,509,922	35,750,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	(4,085,000)	(4,085,000)
Penyelenggaraan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	298,935,000	-	1,600,000	355,374,000	5,000,000	292,175,400		1,600,000	196,091,500	5,000,000	0.98		1.00	0.55	1.00	(73,483,750)	(71,793,850)
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	7,960,000	7,960,000	2,850,000	2,993,565,600	2,993,565,600	5,520,000	7,960,000	2,090,000	2,977,571,720	2,993,565,600	0.69	1.00	0.73	0.99	1.00	746,401,400	747,011,400
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	-	17,560,000	8,525,000	7,260,000	7,260,000	-	15,560,000	8,525,000	7,139,922	7,260,000		0.89	1.00	0.98	1.00	1,815,000	1,815,000
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	-	96,370,000	67,130,000	45,195,000	64,225,000	-	93,530,000	59,031,958	44,144,438	64,225,000		0.97	0.88	0.98	1.00	16,056,250	16,056,250
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD			30,980,000	16,716,000	26,716,000			30,980,000	16,716,000	26,716,000			1.00	1.00	1.00	6,679,000	6,679,000
Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa			8,280,000	2,000,100	2,000,100			8,279,766	2,000,100	2,000,100			1.00	1.00	1.00	500,025	500,025
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	42,480,000	88,910,500	278,537,000	174,065,000	180,735,000	21,070,000	88,910,500	261,527,158	173,974,518	180,735,000	0.50	1.00	0.94	1.00	1.00	34,563,750	39,916,250
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	189,400,000	386,675,000	477,509,400	508,899,900	538,830,000	137,015,000	383,075,000	477,107,306	506,569,393	538,830,000	0.72	0.99	1.00	1.00	1.00	87,357,500	100,453,750

Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	189,400,000	386,675,000	477,509,400	508,899,900	538,830,000	137,015,000	383,075,000	477,107,306	506,569,393	538,830,000	0.72	0.99	1.00	1.00	1.00	87,357,500	100,453,750
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPMdan Karang Taruna)Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12,960,000	165,675,000	259,264,400	248,909,900	75,990,000	4,370,000	165,075,000	259,264,400	246,873,770	75,990,000	0.34	1.00	1.00	0.99	1.00	15,757,500	17,905,000
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1,000,000	1,000,000	2,865,000	19,515,000	39,495,000	1,000,000	1,000,000	2,865,000	19,514,961	39,495,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9,623,750	9,623,750
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-	13,430,000	-		14,710,000	-	13,430,000	-		14,710,000		1.00			1.00	3,677,500	3,677,500
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	175,440,000	206,570,000	215,380,000	240,475,000	278,880,000	131,645,000	203,570,000	214,977,906	240,180,662	278,880,000	0.75	0.99	1.00	1.00	1.00	25,860,000	36,808,750
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga					129,755,000					129,755,000					1.00	32,438,750	32,438,750
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	850,000	141,190,000	106,117,500	45,420,000	449,027,500	850,000	141,190,000	105,867,400	45,420,000	449,027,500	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	112,044,375	112,044,375

Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	56,400,000	12,750,000	1,200,000	1,200,000	-	56,400,000	12,750,000	1,200,000	1,200,000	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300,000	300,000
Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	-	20,000,000				-	20,000,000				0.00	1.00				-	-
Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	-	10,000,000				-	10,000,000				0.00	1.00				-	-
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	-	10,000,000	12,750,000	1,200,000	1,200,000	-	10,000,000	12,750,000	1,200,000	1,200,000		1.00	1.00	1.00	1.00	300,000	300,000
Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	-	1,000,000				-	1,000,000					1.00				-	-
Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	-	5,400,000				-	5,400,000					1.00				-	-
Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	-	10,000,000				-	10,000,000					1.00				-	-
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	850,000	84,790,000	93,367,500	44,220,000	447,827,500	850,000	84,790,000	93,117,400	44,220,000	447,827,500	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	111,744,375	111,744,375

Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga					60,300,000					60,300,000					1.00	15,075,000	15,075,000
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga					10,000,000					10,000,000					1.00	2,500,000	2,500,000
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga					212,100,000					212,100,000					1.00	53,025,000	53,025,000
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB					123,120,000					123,120,000					1.00	30,780,000	30,780,000
Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga		5,000,000	93,367,500	44,220,000	42,307,500		5,000,000	93,117,400	44,220,000	42,307,500		1.00	1.00	1.00	1.00	10,576,875	10,576,875
Pemetaan Kependudukan		5,000,000					5,000,000					1.00				-	-
Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan		30,000,000					30,000,000					1.00				-	-
Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga		5,000,000					5,000,000					1.00				-	-
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		5,000,000					5,000,000					1.00				-	-
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		24,790,000					24,790,000					1.00				-	-
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	850,000	5,000,000				850,000	5,000,000				1.00	1.00				(212,500)	(212,500)
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK		5,000,000					5,000,000					1.00				-	-
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4,499,010,000	4,864,792,000	3,826,446,000	3,667,052,800	5,115,329,300	3,900,963,100	4,515,060,603	3,326,439,463	3,310,655,424	5,115,329,300	0.87	0.93	0.87	0.90	1.00	154,079,825	303,591,550
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1,490,730,000	875,400,000	650,100,000	632,600,000	1,645,310,000	1,268,115,300	840,902,366	616,515,868	626,917,824	1,645,310,000	0.85	0.96	0.95	0.99	1.00	38,645,000	94,298,675

Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	450,474,000	146,400,000				390,517,000	139,038,156				0.87	0.95				(112,618,500)	(97,629,250)
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	1,040,256,000	729,000,000	650,100,000	632,600,000	975,310,000	877,598,300	701,864,210	616,515,868	626,917,824	975,310,000	0.84	0.96	0.95	0.99	1.00	(16,236,500)	24,427,925
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)					369,180,000					369,180,000					1.00	92,295,000	92,295,000
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang					100,000,000					100,000,000					1.00	25,000,000	25,000,000
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal					10,000,000					10,000,000					1.00	2,500,000	2,500,000
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja					190,820,000					190,820,000					1.00	47,705,000	47,705,000
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	691,200,000	791,215,000	542,400,000	646,100,000	1,167,000,000	690,900,000	790,381,000	542,394,285	645,890,000	1,167,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	118,950,000	119,025,000
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	691,200,000	791,215,000	542,400,000	646,100,000	1,167,000,000	690,900,000	790,381,000	542,394,285	645,890,000	1,167,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	118,950,000	119,025,000
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2,167,320,000	2,577,177,000	2,051,446,000	1,814,802,800	1,893,019,300	1,821,347,800	2,262,777,237	1,585,038,184	1,464,297,600	1,893,019,300	0.84	0.88	0.77	0.81	1.00	(68,575,175)	17,917,875

Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	131,385,000	52,050,000	80,259,000	78,595,000	78,595,000	109,100,000	52,040,000	80,040,000	78,540,000	78,595,000	0.83	1.00	1.00	1.00	1.00	(13,197,500)	(7,626,250)
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	925,270,000	1,062,828,000	1,719,880,000	1,542,975,000	1,745,425,000	682,722,800	900,447,800	1,313,691,544	1,196,285,000	1,745,425,000	0.74	0.85	0.76	0.78	1.00	205,038,750	265,675,550
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1,067,815,000	1,452,299,000				986,675,000	1,300,289,437				0.92	0.90				(266,953,750)	(246,668,750)
Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	3,400,000					3,400,000					1.00					(850,000)	(850,000)
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1,250,000		213,567,000	165,813,000	38,492,000	1,250,000		162,567,000	165,813,000	38,492,000	1.00		0.76	1.00	1.00	9,310,500	9,310,500
Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	5,960,000		37,740,000			5,960,000		28,739,640			1.00		0.76			(1,490,000)	(1,490,000)
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	1,540,000					1,540,000					1.00					(385,000)	(385,000)
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	19,000,000	10,000,000		27,419,800	30,507,300	19,000,000	10,000,000		23,729,800	30,507,300	1.00	1.00		0.87	1.00	2,876,825	2,876,825
Peningkatan Kesertaan KB Pria	11,700,000					11,700,000					1.00					(2,925,000)	(2,925,000)
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	149,760,000	621,000,000	582,500,000	573,550,000	410,000,000	120,600,000	621,000,000	582,491,126	573,550,000	410,000,000	0.81	1.00	1.00	1.00	1.00	65,060,000	72,350,000

Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas					1,200,000					1,200,000					1.00	300,000	300,000
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	149,760,000	621,000,000	582,500,000	573,550,000	408,800,000	120,600,000	621,000,000	582,491,126	573,550,000	408,800,000	0.81	1.00	1.00	1.00	1.00	64,760,000	72,050,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1,609,752,000	3,133,310,000	2,996,800,000	2,999,300,000	2,555,970,000	1,462,800,000	3,068,043,400	2,981,098,062	2,986,202,000	2,555,970,000	0.91	0.98	0.99	1.00	1.00	236,554,500	273,292,500
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1,609,752,000	3,133,310,000	2,996,800,000	2,999,300,000	206,370,000	1,462,800,000	3,068,043,400	2,981,098,062	2,986,202,000	206,370,000	0.91	0.98	0.99	1.00	1.00	(350,845,500)	(314,107,500)
Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)					76,370,000					76,370,000					1.00	19,092,500	19,092,500
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBBKRBKLPPPKSPI K-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	280,000,000	390,000,000				274,800,000	344,353,400				0.98	0.88				(70,000,000)	(68,700,000)
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBBKRBKLPPPKSPI K-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1,329,752,000	2,743,310,000	2,996,800,000	2,999,300,000	130,000,000	1,188,000,000	2,723,690,000	2,981,098,062	2,986,202,000	130,000,000	0.89	0.99	0.99	1.00	1.00	(299,938,000)	(264,500,000)

Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					2,349,600,000					2,349,600,000					1.00	587,400,000	587,400,000
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)					1,068,000,000					1,068,000,000					1.00	267,000,000	267,000,000
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)					1,281,600,000					1,281,600,000					1.00	320,400,000	320,400,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	691,955,600	616,331,000	565,000,000	265,154,000	246,530,000	685,590,715	564,407,000	513,288,100	247,565,200	246,530,000	0.99	0.92	0.91	0.93	1.00	(111,356,400)	(109,765,179)
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	691,955,600	616,331,000	565,000,000	265,154,000	246,530,000	685,590,715	564,407,000	513,288,100	247,565,200	246,530,000	0.99	0.92	0.91	0.93	1.00	(111,356,400)	(109,765,179)
Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Gunung Kidul	691,955,600	616,331,000				685,590,715	564,407,000				0.99	0.92				(172,988,900)	(171,397,679)
Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan			565,000,000	265,154,000	246,530,000			565,000,000	247,565,200	246,530,000			1.00	0.93	1.00	61,632,500	61,632,500

2.1.2 Kelompok sasaran layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPMKPPKB) adalah individu, kelompok, dan institusi yang secara langsung maupun tidak langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan layanan yang dilaksanakan oleh dinas. Penetapan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan tepat sasaran, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kelompok sasaran DPMKPPKB dalam Renstra dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kalurahan/Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Termasuk pemerintah kalurahan/desa, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), serta tokoh masyarakat yang menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Masyarakat Kalurahan/Desa Warga masyarakat pada tingkat kalurahan yang menjadi penerima manfaat dari berbagai program pemberdayaan, seperti pengembangan ekonomi lokal, pelatihan, peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat, serta program pembangunan berbasis partisipasi.
3. Keluarga dan Pasangan Usia Subur Sebagai sasaran utama program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), khususnya untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, sejahtera, dan bertanggung jawab.
4. Remaja dan Calon Pasangan Usia Subur Menjadi sasaran edukasi dan pembinaan dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga, pencegahan pernikahan usia dini, serta penurunan angka stunting dan ketimpangan gender.
5. Keluarga Pra Sejahtera dan Rentan Termasuk dalam kelompok sasaran prioritas untuk intervensi peningkatan ketahanan keluarga, ekonomi produktif, bantuan sosial, dan akses terhadap layanan dasar.
6. Kelompok Perempuan dan Anak Sebagai kelompok yang menjadi perhatian khusus dalam pembangunan berperspektif gender, perlindungan sosial, serta penguatan peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat.
7. Tenaga Lini Lapangan (PLKB/PKB, Kader, dan Pendamping Masyarakat) Merupakan pelaksana teknis lapangan yang perlu mendapat dukungan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas dalam mendampingi masyarakat dan menyukseskan program-program dinas.

Kelompok sasaran ini menjadi bagian integral dalam proses perencanaan strategis, sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan, program prioritas, dan kegiatan yang selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah serta kebutuhan riil masyarakat di tingkat akar rumput.

2.1.3 Mitra Kerja Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKPPKB) senantiasa membangun dan memperkuat sinergi dengan para mitra kerja lintas sektor. Kolaborasi ini menjadi pilar utama dalam mewujudkan masyarakat desa dan kalurahan yang mandiri, berdaya saing, serta memiliki ketahanan keluarga yang kokoh.

Kemitraan yang dijalin meliputi unsur pemerintah pusat dan daerah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, serta tokoh masyarakat dan kelembagaan lokal. Dengan pendekatan partisipatif dan pemberdayaan, mitra kerja DPMKPPKB berperan penting dalam mendukung program-program strategis, antara lain:

- Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas kelembagaan desa/kalurahan, guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif terhadap kebutuhan warga.
- Pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas keluarga, melalui program Keluarga Berencana yang adaptif dan berkelanjutan, serta edukasi kesehatan reproduksi yang inklusif.
- Peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak, sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi keluarga dan mendorong pembangunan manusia secara menyeluruh.
- Pengembangan ekonomi lokal dan ketahanan sosial, melalui fasilitasi BUMDes, pemberdayaan kelompok usaha masyarakat, serta dukungan terhadap inovasi desa.

Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi, mitra kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi juga katalisator perubahan sosial yang bermakna di tingkat akar rumput. Bersama-sama, kita berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat desa dan kalurahan yang sejahtera, berkelanjutan, dan berdaya, sejalan dengan visi pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan.

Adapun mitra kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

- IBI (Ikatan Bidan Indonesia)
- SEMAR (Paguyuban Lurah, Pamong, dan Staf)
- Asosiasi LPMKal (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan) Kabupaten Gunungkidul
- Forum BUMKalMA (Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama) Kabupaten Gunungkidul
- Forum BUMkal (Badan Usaha Milik Kalurahan)
- TPK Tim Pendamping Keluarga: 356, (1.068 orang)
- Perguruan Tinggi (UGM,UGK)
- IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan)
- RIFKANISA Kabupaten Gunungkidul
- Ormas Keagamaan (Muslimat NU dan Aisyah)
- Forum Anak Kabupaten Gunungkidul
- PKBI (Paguyuban Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul)
- PERBANKKAN (Bank Pembangunan Daerah, PT Bank Daerah Gunungkidul)

2.2 Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya merealisasikan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak terlepas dari hal hal yang tidak diharapkan yang merupakan pokok pokok permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah. Permasalahan-permasalahan pelayanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang meliputi tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana periode tahun 2025-2029 diantaranya :

a. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Belum optimalnya Pembangunan Kualitas keluarga di sebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah:

- a.) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kesadaran pentingnya penerapan perencanaan dalam berkeluarga baik dari sisi kematangan usia perkawinan kesehatan produksi dan jumlah anak yang sebagaian besar hal itu di pengaruhi oleh faktor tingkat pendidikan dan pengetahuan yang kurang.
- b.) Terbatasnya jumlah tenaga penyuluh KB yang dimiliki saat ini hanya berjumlah 44 personil yang mencakup 144 kalurahan, kondisi ini sangat jauh dari standar rasio ketersediaan PKB dimana 1 PKB seharusnya menangani program KB di 1 kalurahan.
- c.) Sulitnya regenerasi kader sehingga kurang bisa mengikuti perkembangan program KB di wilayah
- d.) Tingkat partisipasi PUS dalam KB MKJP masih Rendah
- e.) Tingkat kepedulian masyarakat terhadap (4T) dalam memiliki anak masih rendah (Terlalu Tua, Terlalu Muda, Terlalu dekat jarak anak , Terlalu banyak)

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a.) Belum optimalnya pemberdayaan dan partisipasi lembaga
- b.) Belum optimalnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- c.) Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan BUMKal dan BUMKalma.

c. Bidang Bina Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Desa

Belum optimalnya Kapasitas SDM aparatur Pemerintahan yang hal tersebut di pengaruhi oleh:

- a.) Regulasi yang sering berubah dan kurang jelas, dan kadang cepat berubah menjadikan kebingungan dalam menindaklanjuti dan implementasi.
- b.) Penerapan regulasi yang multi tafsir, sehingga berpotensi menimbulkan gugatan administrasi pemerintahan/ tata usaha Negara.

- c.) Keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan keuangan kalurahan dalam pendanaan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, sementara itu banyak kalurahan yang masih lebih bergantung pada pendapatan dari dana transfer pemerintah maupun pemerintah daerah.
- d. Bidang Perencanaan, Keuangan, Kekayaan dan Aset Kalurahan
 Belum optimalnya tata kelola keuangan dan kekayaan kalurahan, yang hal tersebut di pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:
 - a.) Regulasi yang mengatur pedoman penyusunan perencanaan di kalurahan yang spesifik, lengkap, dan mudah dipahami belum sepenuhnya tersedia.
 - b.) Kepatuhan Pemahaman dan kepatuhan Aparat pemerintah Kalurahan terhadap regulasi pengelolaan keuangan yang masih kurang
 - c.) Pemahaman dan keputusan Aparat pemerintah Kalurahan terhadap regulasi pengadaan barang dan jasa serta tata kelola kekayaan kalurahanyang masih kurang

2.2.2 Isu Strategis

Berdasarkan analisa tersebut, terdapat beberapa isu strategis yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, antara lain:

- a. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan
 - a) Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kalurahan

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kalurahan merupakan salah satu isu strategis dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa/kalurahan. Aparatur kalurahan memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta penegakan regulasi di tingkat lokal. Namun, masih dijumpai berbagai tantangan yang memengaruhi optimalisasi peran tersebut.

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi antara lain adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur, keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi informasi, kurangnya pemahaman terhadap regulasi dan mekanisme administrasi pemerintahan, serta minimnya pelatihan dan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelayanan publik yang belum optimal, serta lemahnya akuntabilitas dan transparansi.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur kalurahan harus menjadi prioritas strategis, melalui program-program pelatihan berbasis kebutuhan, penguatan sistem digitalisasi

administrasi desa, peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta insentif yang mendorong profesionalitas dan integritas aparatur.

Penanganan isu ini secara serius akan memperkuat pondasi pemerintahan yang responsif, partisipatif, dan akuntabel di tingkat lokal, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di tingkat desa/kalurahan.

b) Tata Kelola Keuangan dan Kekayaan Kalurahan

Tata kelola keuangan dan kekayaan kalurahan merupakan aspek krusial dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa/kalurahan. Pengelolaan keuangan yang baik mencerminkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, sedangkan pengelolaan kekayaan kalurahan (aset desa) yang tepat dapat menjadi penopang keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan yang menghambat optimalisasi tata kelola keuangan dan kekayaan kalurahan. Di antaranya adalah rendahnya kapasitas aparatur dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan; lemahnya sistem pengawasan internal; serta kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi keuangan. Selain itu, pendataan dan pengelolaan aset kalurahan sering kali belum tertib, sehingga aset-aset desa belum mampu dimaksimalkan sebagai sumber daya produktif.

Permasalahan ini berisiko menimbulkan penyimpangan anggaran, konflik pengelolaan aset, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan kalurahan.

Sebagai respon strategis, perlu dilakukan penguatan kapasitas aparatur dalam manajemen keuangan dan aset desa melalui pelatihan teknis, pendampingan berkelanjutan, dan penerapan sistem digital berbasis akuntabilitas. Selain itu, penting untuk memastikan adanya regulasi yang jelas, mekanisme pengawasan yang efektif, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan keuangan dan kekayaan kalurahan.

Dengan tata kelola keuangan dan aset yang baik, kalurahan dapat meningkatkan kemandirian fiskal, memperkuat pembangunan berbasis potensi lokal, serta menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka dan terpercaya.

c) Pemberdayaan dan partisipasi lembaga kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan di kalurahan, seperti LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Kalurahan), PKK, Karang Taruna, RT/RW, dan lembaga adat, memiliki peran penting dalam memperkuat partisipasi masyarakat serta menjadi mitra strategis dalam pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Keberadaan lembaga-lembaga ini seharusnya menjadi motor penggerak keterlibatan warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pemerintahan kalurahan.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemberdayaan dan partisipasi lembaga kemasyarakatan masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah lemahnya kapasitas organisasi dan SDM, kurangnya dukungan anggaran dan fasilitas, tidak adanya pembinaan yang berkelanjutan, serta minimnya pelibatan secara aktif dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. Selain itu, koordinasi antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah kalurahan sering kali belum berjalan optimal.

Kondisi ini menyebabkan potensi lembaga kemasyarakatan belum tergali secara maksimal, dan partisipasi masyarakat menjadi cenderung pasif. Akibatnya, program pembangunan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, dan keberlanjutan kegiatan kemasyarakatan menjadi lemah.

Sebagai langkah strategis, perlu dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan secara menyeluruh melalui pelatihan, fasilitasi, dan insentif yang memadai. Pemerintah kalurahan juga perlu mengembangkan pola kemitraan yang partisipatif dan transparan, serta mendorong kolaborasi antar-lembaga dalam pelaksanaan program. Dengan pemberdayaan yang tepat, lembaga kemasyarakatan dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, berbasis aspirasi, dan berkelanjutan.

d) Pengelolaan dan Pengembangan BUMKal dan BUMKalma

BUMKal (Badan Usaha Milik Kalurahan) dan BUMKalma (Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama) merupakan instrumen penting dalam mendorong kemandirian ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua lembaga ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa melalui pengelolaan usaha-usaha produktif yang berbasis potensi lokal dan kebutuhan warga.

Namun, dalam implementasinya, pengelolaan dan pengembangan BUMKal dan BUMKalma masih menghadapi sejumlah tantangan strategis. Di antaranya adalah belum optimalnya tata kelola kelembagaan, lemahnya kapasitas manajerial dan SDM pengelola, terbatasnya akses permodalan dan pendampingan usaha, serta belum jelasnya arah

pengembangan unit usaha yang berkelanjutan dan sesuai dengan potensi lokal.

Selain itu, masih rendahnya partisipasi masyarakat dan kurangnya koordinasi antara BUMKal/BUMKalma dengan pemerintah kalurahan serta mitra eksternal menyebabkan usaha yang dijalankan belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli kalurahan (PAKal) maupun peningkatan ekonomi warga.

Oleh karena itu, penguatan kelembagaan BUMKal dan BUMKalma menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain: peningkatan kapasitas pengelola melalui pelatihan dan pendampingan; penyusunan rencana bisnis yang jelas dan realistis; penguatan kemitraan usaha; serta pengawasan dan evaluasi yang transparan. Pemerintah kalurahan juga perlu memberikan dukungan kebijakan dan anggaran untuk mendorong keberlangsungan dan pertumbuhan usaha.

Dengan pengelolaan yang profesional dan berorientasi pada potensi lokal, BUMKal dan BUMKalma dapat menjadi lokomotif ekonomi desa yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan.

b. Penyelenggaraan pengendalian penduduk, dan keluarga berencana

a) Pembangunan kualitas keluarga

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran sentral dalam membentuk karakter, nilai-nilai, dan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan kualitas keluarga menjadi pondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berdaya. Oleh karena itu, penguatan ketahanan keluarga menjadi isu strategis dalam pembangunan sosial di tingkat kalurahan.

Di beberapa kalurahan, masih ditemukan berbagai tantangan dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas. Beberapa di antaranya adalah:

- Rendahnya Kesadaran Akan Pola Hidup Sehat dan Pendidikan Anak Banyak keluarga belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pentingnya gizi seimbang, pola asuh yang tepat, serta pentingnya pendidikan anak sejak usia dini.
- Tingginya Angka Pernikahan Dini Pernikahan usia anak masih terjadi di beberapa wilayah, yang berdampak pada tingginya angka putus sekolah, kemiskinan struktural, dan risiko kesehatan ibu dan anak.
- Minimnya Akses Terhadap Layanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi Terbatasnya akses dan informasi terhadap layanan KB menyebabkan kurangnya

pengaturan kelahiran dan perencanaan keluarga yang sehat dan sejahtera.

- Rendahnya Ketahanan Ekonomi Keluarga Banyak keluarga masih berada di bawah garis kemiskinan dan belum mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak, yang pada akhirnya berpengaruh pada kualitas kehidupan dan masa depan anak-anak.
- Kurangnya Kesetaraan dan Peran Serta Anggota Keluarga

Ketimpangan peran gender dalam rumah tangga, serta minimnya partisipasi laki-laki dalam pengasuhan dan pengambilan keputusan rumah tangga juga menjadi hambatan dalam membentuk keluarga harmonis dan setara.

b) Turunya angka kelahiran

Angka kelahiran merupakan salah satu indikator penting dalam dinamika kependudukan yang sangat mempengaruhi struktur demografi, pertumbuhan penduduk, serta perencanaan pembangunan jangka panjang. Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Gunungkidul mengalami tren penurunan angka kelahiran, yang perlu dicermati secara strategis oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan pemerintah kalurahan sebagai bagian dari isu pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Penurunan angka kelahiran yang signifikan dapat membawa dampak positif dalam konteks pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, fenomena ini juga bisa menimbulkan sejumlah tantangan baru, seperti:

- Menuanya Struktur Penduduk (Aging Population) Penurunan angka kelahiran yang terus-menerus berpotensi menyebabkan ketimpangan struktur umur, di mana jumlah penduduk usia tua meningkat lebih cepat dibandingkan kelompok usia produktif.
- Risiko Menurunnya Tenaga Kerja Produktif Dalam jangka panjang, penurunan kelahiran dapat berdampak pada berkurangnya pasokan tenaga kerja lokal, yang kemudian memengaruhi produktivitas dan daya saing ekonomi kalurahan.
- Peningkatan Beban Ekonomi dan Sosial Dengan jumlah lansia yang meningkat, beban keluarga dan pemerintah terhadap penyediaan layanan kesehatan dan jaminan sosial juga akan meningkat, sementara generasi muda yang menopang sistem ekonomi semakin berkurang.
- Berubahnya Pola Kehidupan Keluarga Turunnya angka kelahiran sering diikuti dengan menurunnya jumlah anggota keluarga, yang berdampak pada berkurangnya solidaritas antar

anggota keluarga dan komunitas, serta munculnya masalah kesepian dan isolasi sosial, terutama di kalangan lansia.

Adapun Faktor yang mempengaruhi menurunnya angka kelahiran di Gunungkidul diantaranya sebagai berikut:

- Meningkatnya usia menikah dan penundaan memiliki anak
- Perubahan gaya hidup masyarakat muda
- Semakin kuatnya kesadaran keluarga kecil dan perencanaan keluarga
- Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan dan dunia kerja

Adapun gambaran dari Isu Strategis Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga tercermin dalam Tabel 2.4

Tabel 2.4 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan	Belum optimalnya kapasitas SDM Aparatur Pemerintahan Kalurahan	6. Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik	Good Governance	Good Governance di desa	Reformasi Kalurahan	Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kalurahan
	Belum optimalnya Tata Kelola Keuangan dan Kekayaan Kalurahan					Tata Kelola Keuangan dan Kekayaan Kalurahan
	Belum optimalnya Pemberdayaan dan partisipasi lembaga					Pemberdayaan dan partisipasi lembaga kemasyarakatan
	Belum optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan BUMKal dan BUMKalma					Pengelolaan dan Pengembangan BUMKal dan BUMKalma
Penyelenggaraan pengendalian penduduk, dan keluarga berencana	Belum optimalnya Pembangunan kualitas keluarga	1. Ancaman penurunan kualitas lingkungan hidup, peningkatan risiko bencana dan peningkatan kerentanan perubahan iklim	Kehidupan sehat dan sejahtera	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peningkatan kualitas keluarga	Pembangunan kualitas keluarga
	Angka kelahiran yang semakin menurun					Turunya angka kelahiran

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam merumuskan tujuan, sasaran, Strategi dan Arah kebijakan yang merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (strategic objective). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (learning process).

Arah kebijakan merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang berfungsi sebagai jembatan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dengan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan. Arah kebijakan menjelaskan fokus, prioritas, serta pendekatan strategis yang akan diambil oleh sebuah organisasi, instansi, atau unit kerja dalam mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan.

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung tercapainya Rencana dan Pogram Kegiatan Pemerintah Daerah maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menetapkan tujuan dinas yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang baik, Pengendalian Angka Kelahiran dan Pembangunan Keluarga. Sebagai institusi yang memiliki mandat besar dalam pembangunan masyarakat dari akar rumput, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan kalurahan yang baik, menurunkan angka kelahiran yang tidak terencana, serta mendorong terbangunnya keluarga yang berkualitas.

Tata kelola pemerintahan kalurahan yang baik (good village governance) menjadi fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan warganya. Melalui penguatan kapasitas aparatur kalurahan, pembinaan lembaga kemasyarakatan, serta pemanfaatan teknologi

informasi dalam pelayanan publik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berhasil meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kalurahan. Hal ini terlihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan, tertib administrasi, serta meningkatnya integritas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa.

Pemerintahan Kalurahan merupakan ujung tombak pelayanan publik dan pengelolaan pembangunan di tingkat desa. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Kalurahan yang baik mencerminkan komitmen seluruh unsur pemerintah desa dalam membangun sistem yang transparan, partisipatif, akuntabel, efektif, dan efisien. Tata kelola yang baik ditandai dengan adanya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi serta keterbukaan informasi publik. Pemerintah Kalurahan senantiasa mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program dan kegiatan desa. Dengan melibatkan masyarakat, kebijakan yang diambil akan lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan nyata warga.

Selain itu, akuntabilitas juga menjadi fokus utama. Setiap penggunaan dana, baik dari APBKal maupun sumber lain, dikelola secara bertanggung jawab dan dilaporkan secara transparan kepada masyarakat. Sistem administrasi diperkuat dengan digitalisasi dan peningkatan kapasitas aparatur desa, sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih cepat dan tepat.

Kehadiran Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat turut menjadi mitra strategis dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Sinergi ini menciptakan kontrol sosial yang sehat serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kalurahan. Melalui kerja keras, sinergi yang solid, dan semangat pelayanan, Pemerintah Kalurahan bertekad mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik bukan hanya menjadi tujuan, namun juga menjadi budaya kerja yang terus dijaga dan dikembangkan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kalurahan.

Di sisi lain, pengendalian angka kelahiran juga menjadi agenda penting dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan daya dukung pembangunan. Melalui program Keluarga Berencana (KB) yang inklusif, edukatif, dan mudah diakses, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana berhasil menekan angka kelahiran yang tidak diinginkan, serta memperluas jangkauan layanan KB aktif, khususnya di kalangan Pasangan Usia Subur (PUS). Strategi jemput bola melalui layanan KB mobile, penyuluhan terpadu, dan pelibatan kader di tingkat lapangan terbukti efektif meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga.

Selanjutnya, program pembangunan keluarga difokuskan pada peningkatan kualitas kehidupan keluarga dalam berbagai dimensi: kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan ketahanan sosial. Melalui penguatan kelompok kegiatan seperti BKB, BKR, BKL, dan UPPKA, serta integrasi dengan upaya pencegahan stunting, DPMKPPKB mendorong lahirnya keluarga-keluarga yang tangguh dan mandiri. Pendekatan ini bukan hanya menempatkan keluarga sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek yang aktif merancang masa depan yang lebih baik. Sinergi antara tata kelola pemerintahan kalurahan, pengendalian penduduk, dan pembangunan keluarga mencerminkan model pembangunan yang menyatu dan berkelanjutan. DPMKPPKB terus berkomitmen untuk

memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan, memastikan setiap kebijakan menyentuh kebutuhan riil warga, serta menciptakan lingkungan sosial yang sehat, produktif, dan sejahtera.

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Sasaran dari “Akuntabilitas Pemerintahan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Meningkat” ini bertujuan untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan kalurahan yang transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab. Akuntabilitas dalam pemerintahan kalurahan menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah di tingkat lokal. Melalui peningkatan akuntabilitas, diharapkan setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan pembangunan dan penggunaan anggaran dapat diawasi dan dikontrol bersama oleh masyarakat.

Peningkatan pemberdayaan masyarakat juga menjadi bagian tak terpisahkan dari sasaran ini. Masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang aktif berpartisipasi dalam setiap tahapan pengambilan keputusan. Dengan meningkatkan kapasitas dan peran aktif masyarakat, akan terbentuk komunitas yang mandiri, kritis, dan berdaya saing. Melalui sinergi antara pemerintahan kalurahan yang akuntabel dan masyarakat yang berdaya, diharapkan terwujud pembangunan yang lebih berkelanjutan, adil, dan berpihak pada kebutuhan riil warga.

Sasaran dari “Pemberdayaan masyarakat meningkat”. Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang mandiri, berdaya saing, dan berkeadilan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terus mendorong peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui beberapa Program dan Kegiatan. Pemberdayaan masyarakat difokuskan pada penguatan kapasitas kelembagaan desa/kalurahan, peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta pemanfaatan potensi lokal yang berkelanjutan. Melalui pelatihan, pendampingan, serta fasilitasi akses terhadap sumber daya, masyarakat kini semakin mampu menyusun dan mengelola program berbasis kebutuhan lokal secara mandiri.

Beberapa kelompok sasaran strategis yang kini mendapat perhatian lebih luas meliputi:

- Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK) dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), sebagai mitra utama dalam penguatan tata kelola pemerintahan desa;
- Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Kader KB, sebagai garda terdepan dalam program pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas keluarga;
- Kelompok usaha ekonomi produktif, seperti BUMKal dan UMKM, yang mendapatkan pelatihan dan fasilitasi pengembangan kapasitas;
- Kelompok rentan, seperti lansia, disabilitas, dan keluarga berisiko stunting, yang menjadi prioritas dalam program terpadu pemberdayaan dan perlindungan sosial.

Selain itu, sinergi dengan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana semakin memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan sosial yang berkelanjutan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana juga mendorong transformasi digital di tingkat kalurahan melalui pengembangan sistem informasi desa dan pelayanan publik berbasis teknologi. Hal ini membuka akses informasi yang lebih luas dan mempercepat proses pengambilan keputusan partisipatif. Dengan

kolaborasi antara pemerintah daerah, kalurahan, dan masyarakat, pemberdayaan yang berkelanjutan bukan hanya menjadi slogan, melainkan telah menjadi gerakan nyata yang mengubah wajah pembangunan dari bawah. Peningkatan kualitas hidup, kemandirian ekonomi, dan ketahanan sosial masyarakat menjadi bukti keberhasilan kerja bersama ini.

Ke depan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkomitmen untuk terus meningkatkan dan memperluas jangkauan program, kegiatan dan memastikan masyarakat dapat merasakan manfaat dari peningkatan pemberdayaan tersebut.

Sasaran dari “Meningkatnya Kepesertaan KB pada PUS”. Salah satu sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana adalah meningkatnya kepesertaan Keluarga Berencana (KB) pada Pasangan Usia Subur (PUS). Sasaran ini bertujuan untuk mendukung pencapaian pengendalian laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan kualitas hidup keluarga, serta memperkuat ketahanan keluarga dan pembangunan sumber daya manusia.

Meningkatnya kepesertaan KB pada PUS mencerminkan keberhasilan program dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga, serta meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kontrasepsi yang merata, khususnya di wilayah-wilayah dengan tingkat partisipasi yang masih rendah. Selain itu, sasaran ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengendalian kuantitas penduduk yang selaras dengan peningkatan kualitas.

Melalui kolaborasi lintas sektor, pemberdayaan kader dan tenaga penyuluh lapangan, serta optimalisasi pelayanan KB yang responsif dan inklusif, diharapkan terjadi peningkatan jumlah dan cakupan PUS yang menjadi peserta aktif program KB, baik melalui metode kontrasepsi jangka pendek maupun jangka panjang. Peningkatan ini tidak hanya menjadi indikator keberhasilan program KB, tetapi juga menjadi landasan penting dalam menciptakan keluarga yang sehat, sejahtera, dan produktif.

Sasaran dari “Meningkatnya Keaktifan Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga”. Dalam upaya memperkuat pembangunan keluarga sebagai fondasi ketahanan sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terus mendorong penguatan dan perluasan kelompok-kelompok kegiatan berbasis masyarakat. Hasilnya, terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah dan aktivitas Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) di berbagai wilayah.

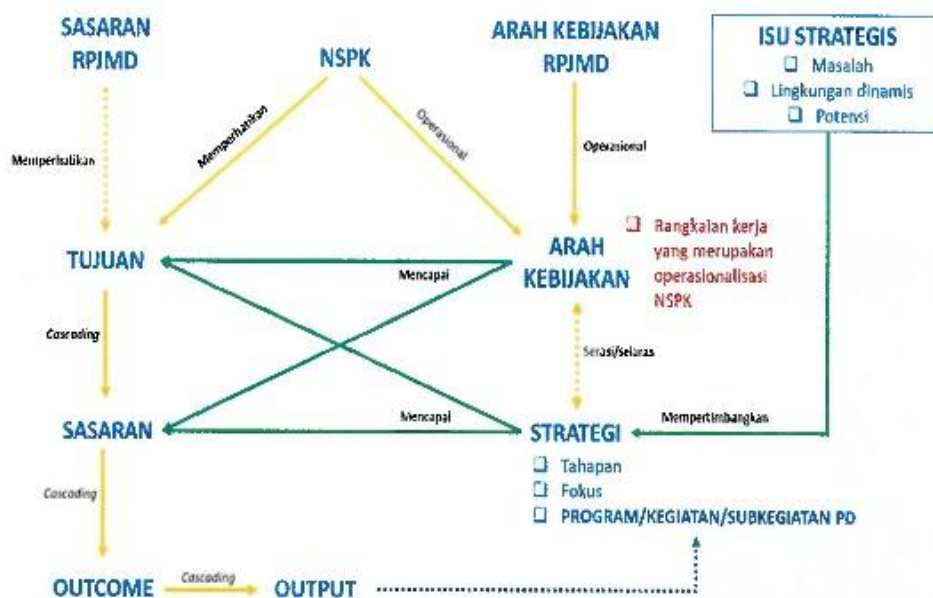
Kelompok-kelompok ini tidak hanya aktif secara administratif, tetapi juga menjalankan peran nyata dalam mendampingi keluarga dalam berbagai siklus kehidupannya. Melalui kegiatan edukatif, pelatihan, konseling, hingga pemberdayaan ekonomi, kelompok-kelompok ini berperan penting dalam mewujudkan keluarga berkualitas yang tangguh secara sosial, ekonomi, dan mental-spiritual.

- Kelompok BKB semakin aktif memberikan pembinaan kepada orang tua dalam mengasuh anak usia dini secara optimal, termasuk deteksi dini tumbuh kembang anak dan pencegahan stunting.
- Kelompok BKR turut hadir sebagai wadah dialog antara orang tua dan remaja dalam menghadapi tantangan masa transisi menuju dewasa,

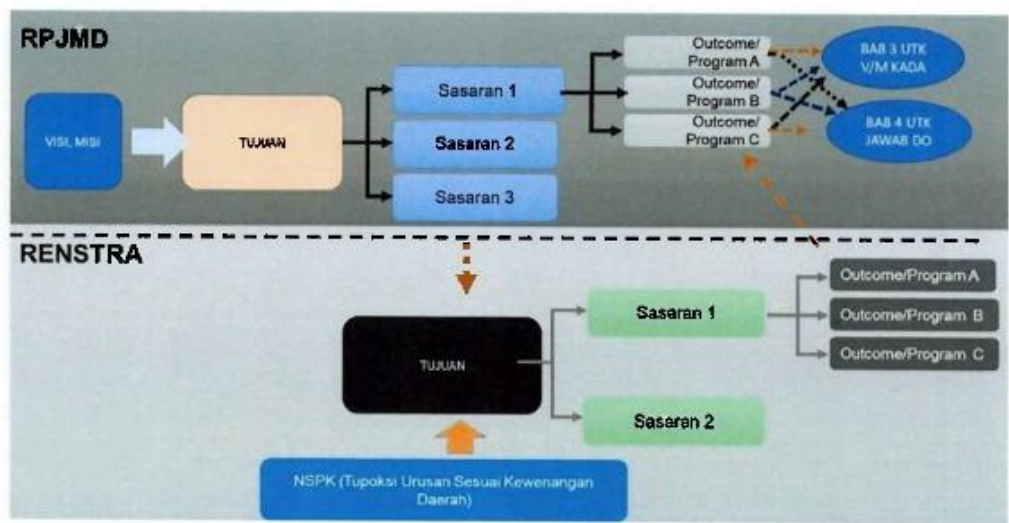
- termasuk pencegahan pernikahan dini dan penyuluhan kesehatan reproduksi.
- Kelompok BKL menjadi tempat berkegiatan bagi para lansia agar tetap sehat, aktif, dan produktif di masa tua, sekaligus memperkuat nilai-nilai kekeluargaan antar generasi.
- Kelompok UPPKA berkembang menjadi sarana pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor melalui berbagai usaha produktif yang berbasis potensi lokal, seperti kerajinan, kuliner, dan jasa.

Peningkatan keaktifan kelompok-kelompok ini merupakan hasil dari pembinaan berkelanjutan, dukungan fasilitasi kegiatan, serta kolaborasi antara kader, pemerintah kalurahan, dan mitra kerja. Pendekatan berbasis keluarga dan komunitas terbukti efektif dalam menjangkau langsung sasaran dan menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara holistik. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkomitmen untuk terus memperkuat kapasitas kader, memperluas jangkauan wilayah binaan, serta mendorong integrasi program agar kelompok-kelompok ini tetap adaptif dan relevan dalam menghadapi dinamika sosial masyarakat saat ini. Dengan meningkatnya jumlah kelompok yang aktif, tercermin pula semangat gotong royong dan kemandirian masyarakat dalam membangun keluarga sebagai pilar utama pembangunan bangsa. Adapun Konsep Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tercermin dalam Gambar 3.1 dan Gambar 3.2

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Dalam rangka tercapainya Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentunya di butuhkan metode atau teknik yang tergambar dalam Teknik merumuskna Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas yang tersebut dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.08.2.14.2.13.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
- Terciptanya Kondisi Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan - Terwujudnya Sistem Penyelenggara Pemerintahan Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang baik, Pengendalian Angka Kelahiran dan Pembangunan Keluarga		Indeks Desa (Indeks)	0.8550	0.8650	0.8750	0.8850	0.8950	0.9050	
			TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	
		Akuntabilitas pemerintahan kalurahan meningkat	Persentase Kalurahan yang Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) Tepat Waktu (%)	100	100	100	100	100	100	
		Pemberdayaan masyarakat meningkat	Persentase Desa Mandiri (%)	97.22	97.92	98.61	99.31	100	100	
		Meningkatnya Kepesertaan KB pada PUS	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR (%))	71.15	71.2	71.25	71.30	71.35	71.40	
		Meningkatnya keaktifan kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga yang Aktif Melaksanakan Kegiatan (%)	15.34	16.34	17.34	18.34	19.34	20.34	

3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam upaya mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menetapkan strategi pembangunan yang terarah, terukur, dan partisipatif. Strategi ini disusun untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka pembangunan daerah, khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat, tata kelola pemerintahan kalurahan, pengendalian penduduk, dan pembangunan keluarga. Adapun strategi untuk mencapai tujuan itu sebagai tersebut dalam tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2. Strategi Perangkat Daerah

Visi	Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban		
Misi 4	Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban		
Misi 5	Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang baik, Pengendalian Angka Kelahiran dan Pembangunan Keluarga	Akuntabilitas pemerintahan kalurahan meningkat	Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	Meningkatkan kapasitas aparatur kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan
	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Meningkatkan pembinaan lembaga kemasyarakatan	meningkatkan kapasits lembaga kemasyarakatan kalurahan
			Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan BUMKal dan BUMKalma
	Meningkatnya Kepesertaan KB pada PUS	Peningkatan pengendalian penduduk dengan pengendalain laju pertumbuhan penduduk	Meningkatkan pengendalian penduduk melalui pembinaan , pembinaan kelompok bina keluarga (Balita, Remaja, Lansia), pembinaan

			kampung Keluarga Berkualitas, dan sekolah siaga kependudukan pada lembaga formal
			Meningkatkan penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana pelayanan KB, dan pelayanan KB
			Meningkatkan pelaksanaan advokasi, KIE , dan pemberdayaan Kader
	Meningkatnya keaktifan kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Peningkatan pembinaan keluarga berencana dan peningkatan keluarga sejahtera	Meningkatkan peran serta organisasi masyarakat dan pembinaan kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
			Meningkatkan pendayagunaan tenaga lini lapangan

Dalam penerapan strategi untuk tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menetapkan Tahapan Renstra sebagaimana tersebut dalam tabel 3.3 berikut ini

Tabel 3.3 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan	Percepatan Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
Penguatan Pengendalian Angka Kelahiran dan Pembangunan Keluarga	Percepatan Pengendalian Angka Kelahiran dan Pembangunan Keluarga	Peningkatan Pengendalian Angka Kelahiran dan Pembangunan Keluarga	Optimalisasi Pengendalian Angka Kelahiran dan Pembangunan Keluarga	

- 3.4. Arah Kebijakan Perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- Arah Kebijakan kebijakan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menunjukkan bagaimana cara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Arah kebijakan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- Arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang baik tentang bagaimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Adapun arah kebijakan yang telah di tetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penyelenggaraa n pemerintahan daerah yang efisien dan efektif	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang baik	Meningkatkan kapasitas aparatur kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dan kapasitas kelembagaan masyarakat	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
		Meningkatkan pemberdayaan dan keberdayaan masyarakat kalurahan	Meningkatkan kapasits lembaga kemasyarakatan kalurahan	
		Meningkatnya pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas dan kewirausahaan	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan BUMKal dan BUMKalma	
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial dan ekonomi		
	Penyelenggaraa n pelayanan KB, pesertaan KB, dan evaluasi program KB	Meningkatkan penyuluh KB untuk memperluas layanan dan edukasi kepada masyarakat	Meningkatkan pengendalian penduduk melalui pembinaan , pembinaan kelompok bina keluarga (Balita, Remaja, Lansia), pembinaan kampung Keluarga Berkualitas, dan sekolah siaga kependudukan pada lembaga formal	
		Meningkatkan dukungan operasional bagi kader di lapangan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program KB	Meningkatkan penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana pelayanan KB, dan pelayanan KB	
		Meningkatkan kepesertaan KB baru untuk memperkuat keberlanjutan program dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga	Meningkatakan pelaksanaan advokasi, KIE , dan pemberdayaan Kader	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
		Meningkatkan upaya pembinaan dan kesejahteraan keluarga	Meningkatkan peran serta organisasi masyarakat, dan pembinaan kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	
		Meningkatkan edukasi dan pendampingan dalam perencanaan keluarga	Meningkatkan pendayagunaan tenaga lini lapangan,	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel, perangkat daerah memiliki peran strategis sebagai pelaksana urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat maupun yang menjadi kewenangan daerah. Periode Rencana Strategis 2025–2029 menjadi momentum penting bagi perangkat daerah untuk merancang arah pembangunan lima tahun ke depan melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan daerah.

Program, kegiatan, dan subkegiatan merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat perangkat daerah. Perencanaan tersebut mengacu pada kerangka regulasi yang telah ditetapkan, antara lain Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan perubahannya melalui Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Dalam dokumen Renstra ini, program dijabarkan sebagai kumpulan kegiatan yang saling mendukung untuk mencapai tujuan strategis perangkat daerah, sesuai dengan bidang urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Setiap kegiatan merupakan bagian dari program yang dirancang untuk mencapai sasaran yang lebih spesifik, sedangkan subkegiatan menjadi pelaksanaan teknis operasional yang lebih rinci, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja.

Seluruh pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu pada prinsip pengelolaan berbasis hasil (*result-based management*), dengan indikator kinerja yang terukur, relevan, dan dapat dievaluasi. Capaian kinerja menjadi acuan dalam mengukur efektivitas pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah kepada masyarakat. Melalui sinergi antara perencanaan teknokratik, partisipatif, politis, dan top-down serta bottom-up, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan secara transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga akan terus mendorong inovasi, efisiensi pelaksanaan anggaran, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

4.1. Uraian Program

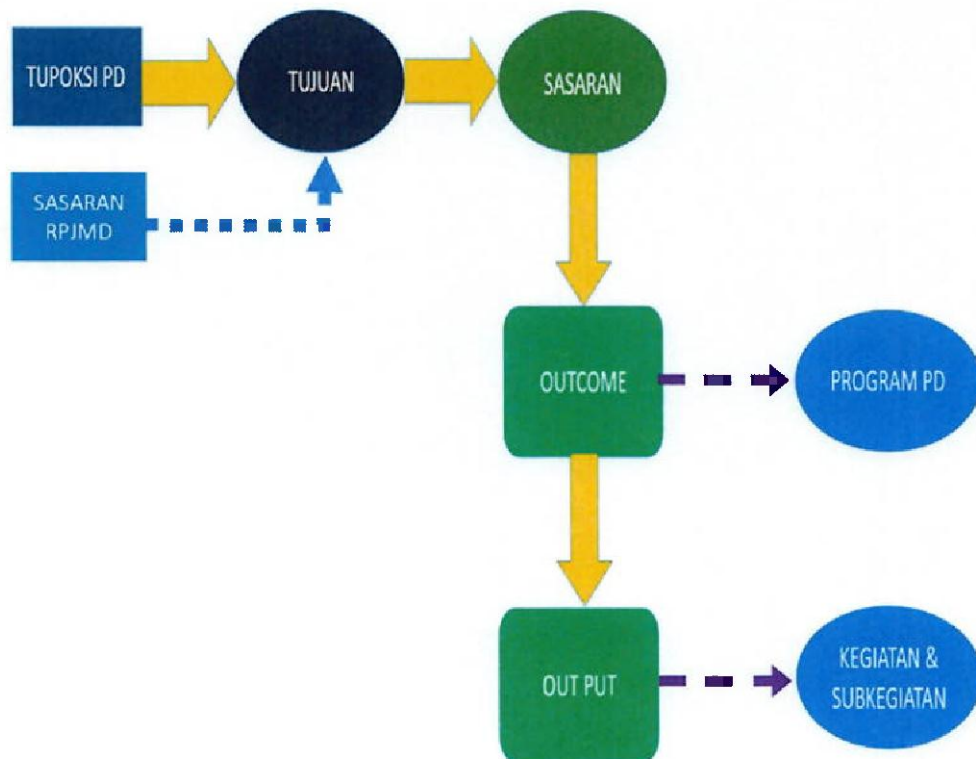
Dalam rangka mendukung Pemerintah Daerah guna terwujudnya tujuan dan sasaran Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul melaksanakan delapan Program antara lain:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Peningkatan Kerja Sama Desa
- c. Program Administrasi Pemerintahan Desa
- d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
- e. Program Pengendalian Penduduk
- f. Program Pembinaan Keluarga Berencana
- g. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga

h. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Adapun kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tersebut dalam Gambar 4.1 berikut ini :

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan



4.2. Uraian Kegiatan

Beberapa keagaitan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam kurun waktu 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- a. Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
- b. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
- d. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- e. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- f. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- j. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
- k. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- l. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
- m. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
- n. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
- o. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
- p. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- q. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- r. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan

Dalam menentukan uraian kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menggunakan teknik sebagaimana tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub kegiatan Rancangan Awal Renstra

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.08.2.14.2.13.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
- Terwujudnya Sistem Penyelenggara Pemerintahan Efektif, Efisien, dan Akuntabel - Terciptanya Kondisi Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang baik, Pengendalian Angka Kelahiran dan Pembangunan Keluarga				Indeks Desa (Indeks)		
					TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)		
		Akuntabilitas pemerintahan kalurahan meningkat			Persentase Kalurahan yang Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) Tepat Waktu (%)		
					Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.13.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.13.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.13.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.13.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.13.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.13.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.13.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.13.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.13.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.13.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	2.13.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.13.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.13.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.13.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.13.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	2.13.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.13.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.13.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	2.13.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.13.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.13.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.13.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.13.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.13.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.13.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.13.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.13.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.13.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.13.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.13.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.13.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Kalurahan yang mendapatkan fasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat		Persentase kalurahan yang mendapatkan fasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat (%)	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Kalurahan yang mendapatkan fasilitasi dalam penyelenggaraan administrasi kalurahan		Persentase Kalurahan Yang Mendapatkan Fasilitasi Dalam Penyelenggaraan Administrasi Kalurahan (%)	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
			Kalurahan yang mendapatkan fasilitasi dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset kalurahan		Persentase kalurahan yang mendapatkan fasilitasi penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset kalurahan (%)	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
			Kalurahan yang mendapatkan fasilitasi dalam penyelenggaraan administrasi kalurahan	kalurahan yang mendapatkan pembinaan penyelenggaraan administrasi kalurahan	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Kalurahan yang mendapatkan fasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
			Kalurahan yang mendapatkan fasilitasi dalam penyusunan perencaaan, pengelolaan keuangan dan aset kalurahan	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan dalam perencanaan, pengelolaan keuangan, dan aset kalurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
			Kalurahan yang mendapatkan fasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Kalurahan yang mendapatkan fasilitasi dalam penyelenggaraan administrasi kalurahan	kalurahan yang mendapatkan pembinaan penyelenggaraan administrasi kalurahan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
			Kalurahan yang mendapatkan fasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
			Kalurahan yang mendapatkan fasilitasi dalam penyelenggaraan administrasi kalurahan	kalurahan yang mendapatkan pembinaan penyelenggaraan administrasi kalurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0001 - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Kalurahan yang mendapatkan fasilitasi dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset kalurahan	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan dalam perencanaan, pengelolaan keuangan, dan aset kalurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0004 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
			Kalurahan yang mendapatkan fasilitasi dalam penyelenggaraan administrasi kalurahan	kalurahan yang mendapatkan pembinaan penyelenggaraan administrasi kalurahan	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orange)	2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0007 - Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	
			Kalurahan yang mendapatkan fasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan pemberdayaan masvarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	
			Kalurahan yang mendapatkan fasilitasi dalam penyelenggaraan administrasi kalurahan	kalurahan yang mendapatkan pembinaan penyelenggaraan administrasi kalurahan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	2.13.04.2.01.0009 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)	2.13.04.2.01.0010 - Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
			Kalurahan yang mendapatkan fasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	2.13.04.2.01.0011 - Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	
			Kalurahan yang mendapatkan fasilitasi dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset kalurahan	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan dalam perencanaan, pengelolaan keuangan, dan aset kalurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0013 - Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	
			Kalurahan yang mendapatkan fasilitasi dalam penyelenggaraan administrasi kalurahan	kalurahan yang mendapatkan pembinaan penyelenggaraan administrasi kalurahan	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	2.13.04.2.01.0014 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	2.13.04.2.01.0016 - Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Kalurahan yang mendapatkan fasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	2.13.04.2.01.0018 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	
			Kalurahan yang melaksanakan reformasi kalurahan dengan kategori baik		Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Kalurahan dengan Kategori Baik (%)	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
				Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan dalam pelaksanaan reformasi kalurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	
					Persentase Desa Mandiri (%)		
			Cakupan Kalurahan yang melaksanakan kerjasama antar		Persentase Kalurahan Yang Melaksanakan Kerjasama Antar Desa (%)	2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			kalurahan	kalurahan yang terfasilitasi kerjasama antardesa	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.13.03.2.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.13.03.2.01.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kapasitas Lembaga kemasyarakatan kalurahan		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Yang Dibina (%)	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
				pengurus lembaga kemasyarakatan kalurahan yang dibina	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	2.13.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen)	2.13.05.2.01.0008 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
		Meningkatnya Kepesertaan KB pada PUS			Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR (%))		
			Seluruh Wanita memenuhi ketentuan Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dalam melaksanakan perkawinan		Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Seluruh Wanita Usia 25-49 Tahun (Tahun)	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
				sekolah yang mendapatkan pembinaan Sekolah Siaga Kependudukan	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	2.14.02.2.01.0027 - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	
				pelaporan data dan informasi keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	
					Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	2.14.02.2.02.0011 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	
					Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
					Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)	2.14.02.2.02.0027 - Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	
			Menurunya angka unmet need		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				koordinasi lintas sektor tingkat kapanewon	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
					Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	2.14.03.2.01.0013 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
				pembinaan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
					Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				faskes yang mendapatkan distribusi alat dan obat kontrasepsi	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya (Laporan)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya (Laporan)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya (Laporan)	2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	
					Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)	2.14.03.2.03.0011 - Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	
				pelatihan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung KB	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
					Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	2.14.03.2.04.0005 - Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	
					Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
		Meningkatnya keaktifan kelompok kegiatan ketahanan keluarga			Persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga yang Aktif Melaksanakan Kegiatan (%)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)		Persentase Keluarga Yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
				PUS yang melaksanakan konseling	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
				Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	

4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan Pagu indikatif
Adapun Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, dan Pagu indikatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tersebut dalam tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				7.410.325.763		8.023.049.512		8.186.891.284		8.627.210.486		8.683.849.500		
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.222.443.163		3.465.334.512		3.786.141.284		3.924.310.486		4.170.708.017		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	82,99	84,5	3.222.443.163	84,7	3.465.334.512	84,8	3.786.141.284	84,9	3.924.310.486	85	4.170.708.017	2.08.2.14.2.13.01. 0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				33.803.200		41.000.000		49.500.000		58.000.000		66.500.000		
Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	2	2	33.803.200	2	41.000.000	2	49.500.000	2	58.000.000	2	66.500.000		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	17		17		17		17		17			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	3		4		4		4		4			
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11.960.000		15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	11.960.000	2	15.000.000	2	20.000.000	2	25.000.000	2	30.000.000		
2.13.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.285.000		3.000.000		3.500.000		4.000.000		4.500.000		
Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	1	1	2.285.000	1	3.000.000	1	3.500.000	1	4.000.000	1	4.500.000		
2.13.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD				2.245.000		2.500.000		3.000.000		3.500.000		4.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	1	1	2.245.000	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.500.000	1	4.000.000		
2.13.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.165.000		3.500.000		4.000.000		4.500.000		5.000.000		
Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	2	2	2.165.000	2	3.500.000	2	4.000.000	2	4.500.000	2	5.000.000		
2.13.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				2.475.300		3.000.000		3.500.000		4.000.000		4.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	2	2	2.475.300	2	3.000.000	2	3.500.000	2	4.000.000	2	4.500.000		
2.13.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5.734.900		6.000.000		6.500.000		7.000.000		7.500.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	17	5.734.900	17	6.000.000	17	6.500.000	17	7.000.000	17	7.500.000		
2.13.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.753.000		4.500.000		5.000.000		5.500.000		6.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	3	3.753.000	4	4.500.000	4	5.000.000	4	5.500.000	4	6.000.000		
2.13.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.185.000		3.500.000		4.000.000		4.500.000		5.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1	3.185.000	1	3.500.000	1	4.000.000	1	4.500.000	1	5.000.000		
2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.294.215.963		2.385.021.512		2.628.191.284		2.796.158.017		3.001.658.017		
Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	2.294.215.963	1	2.385.021.512	1	2.628.191.284	1	2.796.158.017	1	3.001.658.017		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD (Laporan)	13	13		13		13		13		13			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	376	462		574		574		574		574			
2.13.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.276.620.963		2.357.660.512		2.595.191.284		2.757.658.017		2.957.658.017		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	376	462	2.276.620.963	574	2.357.660.512	574	2.595.191.284	574	2.757.658.017	574	2.957.658.017		
2.13.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.280.000		2.361.000		3.000.000		3.500.000		4.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	2.280.000	1	2.361.000	1	3.000.000	1	3.500.000	1	4.000.000		
2.13.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				15.315.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD (Laporan)	13	13	15.315.000	13	25.000.000	13	30.000.000	13	35.000.000	13	40.000.000		
2.13.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0		2.500.000		0		0		0		
Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	0	1	2.500.000	0	0	0	0	0	0		
2.13.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		2.500.000		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	0	1	2.500.000	0	0	0	0	0	0		
2.13.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				5.082.300		23.000.000		29.000.000		35.000.000		35.500.000		
Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6	6	5.082.300	6	23.000.000	6	29.000.000	6	35.000.000	6	35.500.000		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	0	0		46		46		46		0			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	0		1		1		1		1			
2.13.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.082.300		15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6	6	5.082.300	6	15.000.000	6	20.000.000	6	25.000.000	6	30.000.000		
2.13.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0		4.000.000		4.500.000		5.000.000		5.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (01)	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT (02)	BASELINE TAHUN 2024 (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH (14)	KETERANGAN (15)
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	0	0	1	4.000.000	1	4.500.000	1	5.000.000	1	5.500.000		
2.13.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0		4.000.000		4.500.000		5.000.000		0		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	0	0	0	46	4.000.000	46	4.500.000	46	5.000.000	0	0		
2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				296.027.000		327.505.000		327.000.000		336.052.469		330.900.000		
Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	14	296.027.000	8	327.505.000	8	327.000.000	8	336.052.469	8	330.900.000		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		6		6		6		6			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		9		9		9		9			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	38	36		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	4		12		15		16		19			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	247	288		288		288		288		288			
2.13.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.404.000		8.705.000		9.200.000		9.700.000		10.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	8.404.000	6	8.705.000	6	9.200.000	6	9.700.000	6	10.000.000		
2.13.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				57.940.000		75.000.000		80.000.000		86.000.000		87.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	14	57.940.000	8	75.000.000	8	80.000.000	8	86.000.000	8	87.000.000		
2.13.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.258.000		6.000.000		7.500.000		8.000.000		9.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	4	5.258.000	12	6.000.000	15	7.500.000	16	8.000.000	19	9.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.420.000		16.000.000		17.000.000		17.500.000		18.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	15.420.000	9	16.000.000	9	17.000.000	9	17.500.000	9	18.000.000		
2.13.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.200.000		1.800.000		1.800.000		2.400.000		2.400.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	247	288	1.200.000	288	1.800.000	288	1.800.000	288	2.400.000	288	2.400.000		
2.13.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.200.000		5.000.000		5.500.000		6.000.000		6.500.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	4.200.000	12	5.000.000	12	5.500.000	12	6.000.000	12	6.500.000		
2.13.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				168.292.000		175.000.000		170.000.000		169.452.469		160.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	38	36	168.292.000	12	175.000.000	12	170.000.000	12	169.452.469	12	160.000.000		
2.13.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				35.313.000		40.000.000		36.000.000		37.000.000		38.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4	4	35.313.000	4	40.000.000	4	36.000.000	4	37.000.000	4	38.000.000		
2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				46.000.000		56.000.000		65.000.000		0		15.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	46.000.000	2	56.000.000	3	65.000.000	0	0	2	15.000.000		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	4		4		0		0		0			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2		2		3		0		0			
2.13.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				16.000.000		16.000.000		0		0		0		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	4	16.000.000	4	16.000.000	0	0	0	0	0	0		
2.13.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		15.000.000		35.000.000		0		15.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	10.000.000	2	15.000.000	3	35.000.000	0	0	2	15.000.000		
2.13.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		25.000.000		30.000.000		0		0		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	20.000.000	2	25.000.000	3	30.000.000	0	0	0	0		
2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				188.552.125		251.553.000		271.400.000		271.500.000		273.000.000		
Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	188.552.125	12	251.553.000	12	271.400.000	12	271.500.000	12	273.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48	48		48		48		48		48			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	16		12		12		12		12			
2.13.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.003.000		3.110.000		6.400.000		6.500.000		7.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	3.003.000	12	3.110.000	12	6.400.000	12	6.500.000	12	7.000.000		
2.13.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				110.399.125		125.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48	48	110.399.125	48	125.000.000	48	140.000.000	48	140.000.000	48	140.000.000		
2.13.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				75.150.000		123.443.000		125.000.000		125.000.000		126.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	16	75.150.000	12	123.443.000	12	125.000.000	12	125.000.000	12	126.000.000		
2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				358.762.575		378.755.000		416.050.000		427.600.000		448.150.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	242	209	358.762.575	111	378.755.000	111	416.050.000	111	427.600.000	111	448.150.000		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10	15		10		6		4		10			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	27		40		40		40		40			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi (Unit)	5	18		23		24		25		25			
2.13.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				216.100.000		230.000.000		250.000.000		260.000.000		280.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	242	209	216.100.000	111	230.000.000	111	250.000.000	111	260.000.000	111	280.000.000		
2.13.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				1.200.000		1.500.000		2.000.000		2.500.000		2.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10	15	1.200.000	10	1.500.000	6	2.000.000	4	2.500.000	10	2.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN <i>(01)</i>	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT <i>(02)</i>	BASELINE TAHUN 2024 <i>(03)</i>	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH <i>(14)</i>	KETERANGAN <i>(15)</i>
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET <i>(04)</i>	PAGU <i>(05)</i>	TARGET <i>(06)</i>	PAGU <i>(07)</i>	TARGET <i>(08)</i>	PAGU <i>(09)</i>	TARGET <i>(10)</i>	PAGU <i>(11)</i>	TARGET <i>(12)</i>	PAGU <i>(13)</i>		
2.13.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				11.250.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	27	11.250.000	40	12.000.000	40	13.000.000	40	14.000.000	40	15.000.000		
2.13.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				124.812.575		129.255.000		145.000.000		145.000.000		145.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi (Unit)	1	1	124.812.575	1	129.255.000	1	145.000.000	1	145.000.000	1	145.000.000		
2.13.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.400.000		6.000.000		6.050.000		6.100.000		6.150.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi (Unit)	5	18	5.400.000	23	6.000.000	24	6.050.000	25	6.100.000	25	6.150.000		
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				8.730.000		9.040.000		9.150.000		9.200.000		9.250.000		
Cakupan Kalurahan yang melaksanakan kerjasama antar kalurahan	Persentase Kalurahan Yang Melaksanakan Kerjasama Antar Desa (%)	100	100	8.730.000	100	9.040.000	100	9.150.000	100	9.200.000	100	9.250.000	2.08.2.14.2.13.01. 0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.13.03.2.01 - Fasilitas Kerja Sama antar Desa				8.730.000		9.040.000		9.150.000		9.200.000		9.250.000		
kalurahan yang terfasilitasi kerjasama antardesa	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	18	18	8.730.000	18	9.040.000	18	9.150.000	18	9.200.000	18	9.250.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.03.2.01.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				8.730.000		9.040.000		9.150.000		9.200.000		9.250.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	18	18	8.730.000	18	9.040.000	18	9.150.000	18	9.200.000	18	9.250.000		
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				3.694.060.600		4.013.675.000		3.824.100.000		4.143.700.000		3.946.391.483		
Kalurahan yang mendapatkan fasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat	Persentase kalurahan yang mendapatkan fasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	246.005.000	100	254.762.000	100	260.400.000	100	260.700.000	100	261.000.000	2.08.2.14.2.13.01. 0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				3.694.060.600		4.013.675.000		3.824.100.000		4.143.700.000		3.946.391.483		
Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	2	2	246.005.000	2	254.762.000	2	260.400.000	2	260.700.000	2	261.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	18	18		18		18		18		18			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				31.405.000		32.522.000		32.800.000		33.000.000		33.200.000		
Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	1	2	31.405.000	2	32.522.000	2	32.800.000	2	33.000.000	2	33.200.000		
2.13.04.2.01.0011 - Fasilitasi Penyusunan Profil Desa				7.265.000		7.525.000		7.600.000		7.700.000		7.800.000		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	18	18	7.265.000	18	7.525.000	18	7.600.000	18	7.700.000	18	7.800.000		
2.13.04.2.01.0018 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				207.335.000		214.715.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	2	2	207.335.000	2	214.715.000	2	220.000.000	2	220.000.000	2	220.000.000		
Kalurahan yang mendapatkan fasilitasi dalam penyelenggaraan administrasi kalurahan	Persentase Kalurahan Yang Mendapatkan Fasilitasi Dalam Penyelenggaraan Administrasi Kalurahan (%)	100	100	3.326.288.600	100	3.632.330.000	100	3.435.700.000	100	3.752.000.000	100	3.551.391.483		
2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				3.694.060.600		4.013.675.000		3.824.100.000		4.143.700.000		3.946.391.483		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
kalurahan yang mendapatkan pembinaan penyelenggaraan administrasi kalurahan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	2	1	3.326.288.600	56	3.632.330.000	1	3.435.700.000	58	3.752.000.000	1	3.551.391.483		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	144	144		1		1		1		1			
	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	144	144		288		288		288		288			
	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	90	234		380		380		380		380			
	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	2	1		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	4		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)	13	13		13		13		13		13			
2.13.04.2.01.0001 - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				55.145.000		57.107.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	4	55.145.000	3	57.107.000	3	60.000.000	3	65.000.000	3	70.000.000		
2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				53.432.000		55.333.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	90	234	53.432.000	380	55.333.000	380	60.000.000	380	65.000.000	380	70.000.000		
2.13.04.2.01.0007 - Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				2.550.000		2.640.000		2.700.000		2.800.000		2.900.000		
Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	2	1	2.550.000	2	2.640.000	2	2.700.000	2	2.800.000	2	2.900.000		
2.13.04.2.01.0009 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				200.545.000		250.000.000		10.000.000		300.000.000		10.000.000		
Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	2	1	200.545.000	56	250.000.000	1	10.000.000	58	300.000.000	1	10.000.000		
2.13.04.2.01.0010 - Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				2.998.275.600		3.250.000.000		3.285.000.000		3.300.000.000		3.377.991.483		
Terlaksananya Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)	13	13	2.998.275.600	13	3.250.000.000	13	3.285.000.000	13	3.300.000.000	13	3.377.991.483		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.04.2.01.0014 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				14.281.000		14.750.000		15.000.000		16.000.000		17.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	144	144	14.281.000	288	14.750.000	288	15.000.000	288	16.000.000	288	17.000.000		
2.13.04.2.01.0016 - Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa				2.060.000		2.500.000		3.000.000		3.200.000		3.500.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	144	144	2.060.000	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.200.000	1	3.500.000		
Kalurahan yang mendapatkan fasilitasi dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset kalurahan	Persentase kalurahan yang mendapatkan fasilitasi penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset kalurahan (%)	100	100	121.767.000	100	126.583.000	100	128.000.000	100	131.000.000	100	134.000.000		
2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				3.694.060.600		4.013.675.000		3.824.100.000		4.143.700.000		3.946.391.483		
Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan dalam perencanaan, pengelolaan keuangan, dan aset kalurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	289	289	121.767.000	289	126.583.000	289	128.000.000	289	131.000.000	289	134.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	146	177		203		146		205		146			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	721	721		721		721		721		721			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.04.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				18.210.000		18.858.000		19.000.000		20.000.000		21.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	146	177	18.210.000	203	18.858.000	146	19.000.000	205	20.000.000	146	21.000.000		
2.13.04.2.01.0004 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				34.780.000		36.500.000		37.000.000		38.000.000		39.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	721	721	34.780.000	721	36.500.000	721	37.000.000	721	38.000.000	721	39.000.000		
2.13.04.2.01.0013 - Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				68.777.000		71.225.000		72.000.000		73.000.000		74.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	289	289	68.777.000	289	71.225.000	289	72.000.000	289	73.000.000	289	74.000.000		
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				485.092.000		535.000.000		567.500.000		550.000.000		557.500.000		
Meningkatnya kapasitas Lembaga kemasyarakatan kalurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Yang Dibina (%)	100	100	485.092.000	100	535.000.000	100	567.500.000	100	550.000.000	100	557.500.000	2.08.2.14.2.13.01. 0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				485.092.000		535.000.000		567.500.000		550.000.000		557.500.000		
pengurus lembaga kemasyarakatan kalurahan yang dibina	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	153	1	485.092.000	2	535.000.000	2	567.500.000	2	550.000.000	2	557.500.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	0	0		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN <i>(01)</i>	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT <i>(02)</i>	BASELINE TAHUN 2024 <i>(03)</i>	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH <i>(14)</i>	KETERANGAN <i>(15)</i>
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET <i>(04)</i>	PAGU <i>(05)</i>	TARGET <i>(06)</i>	PAGU <i>(07)</i>	TARGET <i>(08)</i>	PAGU <i>(09)</i>	TARGET <i>(10)</i>	PAGU <i>(11)</i>	TARGET <i>(12)</i>	PAGU <i>(13)</i>		
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				114.112.000		120.000.000		121.000.000		122.000.000		123.000.000		
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	153	1	114.112.000	2	120.000.000	2	121.000.000	2	122.000.000	2	123.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				47.305.000		50.000.000		50.500.000		51.000.000		51.500.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	1	1	47.305.000	1	50.000.000	1	50.500.000	1	51.000.000	1	51.500.000		
2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				0		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	0	0	0	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
2.13.05.2.01.0008 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa				193.920.000		220.000.000		250.000.000		230.000.000		235.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen)	3	3	193.920.000	3	220.000.000	3	250.000.000	3	230.000.000	3	235.000.000		
2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				129.755.000		130.000.000		131.000.000		132.000.000		133.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	0	4	129.755.000	4	130.000.000	4	131.000.000	4	132.000.000	4	133.000.000		
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				7.675.171.800		7.682.462.000		7.693.612.000		7.706.612.000		7.718.612.000		
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				419.822.600		421.370.000		425.020.000		428.020.000		430.020.000		
Seluruh Wanita memenuhi ketentuan Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dalam melaksanakan perkawinan	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Seluruh Wanita Usia 25-49 Tahun (Tahun)	21	22,2	419.822.600	22,4	421.370.000	22,6	425.020.000	22,8	428.020.000	23	430.020.000	2.08.2.14.2.13.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				1.199.900		1.250.000		3.000.000		3.500.000		4.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
sekolah yang mendapatkan pembinaan Sekolah Siaga Kependudukan	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	0	1	1.199.900	2	1.250.000	3	3.000.000	4	3.500.000	5	4.000.000		
2.14.02.2.01.0027 - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal				1.199.900		1.250.000		3.000.000		3.500.000		4.000.000		
Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	0	1	1.199.900	2	1.250.000	3	3.000.000	4	3.500.000	5	4.000.000		
2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				418.622.700		420.120.000		422.020.000		424.520.000		426.020.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN <i>(01)</i>	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT <i>(02)</i>	BASELINE TAHUN 2024 <i>(03)</i>	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH <i>(14)</i>	KETERANGAN <i>(15)</i>
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET <i>(04)</i>	PAGU <i>(05)</i>	TARGET <i>(06)</i>	PAGU <i>(07)</i>	TARGET <i>(08)</i>	PAGU <i>(09)</i>	TARGET <i>(10)</i>	PAGU <i>(11)</i>	TARGET <i>(12)</i>	PAGU <i>(13)</i>		
pelaporan data dan informasi keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	1	1	418.622.700	1	420.120.000	1	422.020.000	1	424.520.000	1	426.020.000		
	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	1	1		1		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				60.300.000		60.300.000		60.300.000		60.300.000		60.300.000		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	1	1	60.300.000	1	60.300.000	1	60.300.000	1	60.300.000	1	60.300.000		
2.14.02.2.02.0011 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga				9.967.500		11.000.000		11.500.000		12.000.000		12.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	1	1	9.967.500	1	11.000.000	1	11.500.000	1	12.000.000	1	12.500.000		
2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				212.100.000		212.100.000		212.100.000		212.100.000		212.100.000		
Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	1	1	212.100.000	1	212.100.000	0	212.100.000	0	212.100.000	0	212.100.000		
2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				123.120.000		123.120.000		123.120.000		123.120.000		123.120.000		
Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	12	12	123.120.000	12	123.120.000	12	123.120.000	12	123.120.000	12	123.120.000		
2.14.02.2.02.0027 - Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				13.135.200		13.600.000		15.000.000		17.000.000		18.000.000		
Terlaksananya Penyusunan profil program Bangga Kencana tingkat Kabupaten/Kota provinsi (Termasuk diseminasi dan evaluasi hasil penyusunan profil Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)	1	1	13.135.200	1	13.600.000	1	15.000.000	1	17.000.000	1	18.000.000		
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				4.702.309.200		4.708.052.000		4.715.552.000		4.725.552.000		4.735.552.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Menurunya angka unmet need	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	9,4	9,3	4.702.309.200	9,25	4.708.052.000	9,2	4.715.552.000	9,15	4.725.552.000	9,1	4.735.552.000	2.08.2.14.2.13.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				1.651.634.900		1.651.634.900		1.651.634.900		1.651.634.900		1.651.634.900		
koordinasi lintas sektor tingkat kapanewon	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	1	1	1.651.634.900	1	1.651.634.900	1	1.651.634.900	1	1.651.634.900	1	1.651.634.900		
	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	10	10		10		10		10		10			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana				978.489.900		978.489.900		978.489.900		978.489.900		978.489.900		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	12	12	978.489.900	12	978.489.900	12	978.489.900	12	978.489.900	12	978.489.900		
2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				372.300.000		372.300.000		372.300.000		372.300.000		372.300.000		
Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	10	10	372.300.000	10	372.300.000	10	372.300.000	10	372.300.000	10	372.300.000		
2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	3	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000		
2.14.03.2.01.0013 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				190.845.000		190.845.000		190.845.000		190.845.000		190.845.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	1	1	190.845.000	1	190.845.000	1	190.845.000	1	190.845.000	1	190.845.000		
2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				1.163.615.000		1.163.615.000		1.163.615.000		1.163.615.000		1.163.615.000		
pembinaan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	1.579	1.579	1.163.615.000	1.579	1.163.615.000	1.579	1.163.615.000	1.579	1.163.615.000	1.579	1.163.615.000		
2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				1.163.615.000		1.163.615.000		1.163.615.000		1.163.615.000		1.163.615.000		
Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	1.579	1.579	1.163.615.000	1.579	1.163.615.000	1.579	1.163.615.000	1.579	1.163.615.000	1.579	1.163.615.000		
2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				1.477.059.300		1.478.502.000		1.481.502.000		1.486.502.000		1.491.502.000		
faskes yang mendapatkan distribusi alat dan obat kontrasepsi	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)	1	1	1.477.059.300	1	1.478.502.000	1	1.481.502.000	1	1.486.502.000	1	1.491.502.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	5.257	3.575		5.257		5.257		5.257		5.257			
	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				78.607.500		78.607.500		78.607.500		78.607.500		78.607.500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	12	12	78.607.500	12	78.607.500	12	78.607.500	12	78.607.500	12	78.607.500		
2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				1.324.392.500		1.324.392.500		1.324.392.500		1.324.392.500		1.324.392.500		
Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	5.257	3.575	1.324.392.500	5.257	1.324.392.500	5.257	1.324.392.500	5.257	1.324.392.500	5.257	1.324.392.500		
2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				38.502.000		38.502.000		38.502.000		38.502.000		38.502.000		
Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	12	12	38.502.000	12	38.502.000	12	38.502.000	12	38.502.000	12	38.502.000		
2.14.03.2.03.0011 - Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				35.557.300		37.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)	1	1	35.557.300	1	37.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000		
2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				410.000.000		414.300.100		418.800.100		423.800.100		428.800.100		
pelatihan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung KB	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	0	18	410.000.000	1	414.300.100	1	418.800.100	1	423.800.100	1	428.800.100		
	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	144	144		144		144		144		144			
2.14.03.2.04.0005 - Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas				1.199.900		5.500.000		10.000.000		15.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	0	18	1.199.900	1	5.500.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000		
2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas				408.800.100		408.800.100		408.800.100		408.800.100		408.800.100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	144	144	408.800.100	144	408.800.100	144	408.800.100	144	408.800.100	144	408.800.100		
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				2.553.040.000		2.553.040.000		2.553.040.000		2.553.040.000		2.553.040.000		
Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	1,5	1,7	2.553.040.000	1,8	2.553.040.000	1,9	2.553.040.000	2	2.553.040.000	2,1	2.553.040.000	2.08.2.14.2.13.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				203.440.000		203.440.000		203.440.000		203.440.000		203.440.000		
PUS yang melaksanakan konseling	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	10	8	203.440.000	8	203.440.000	8	203.440.000	8	203.440.000	8	203.440.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	30	10		10		10		10		10			
2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				73.440.000		73.440.000		73.440.000		73.440.000		73.440.000		
Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	10	8	73.440.000	8	73.440.000	8	73.440.000	8	73.440.000	8	73.440.000		
2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	30	10	130.000.000	10	130.000.000	10	130.000.000	10	130.000.000	10	130.000.000		
2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				2.349.600.000		2.349.600.000		2.349.600.000		2.349.600.000		2.349.600.000		
Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	10	10	2.349.600.000	10	2.349.600.000	10	2.349.600.000	10	2.349.600.000	10	2.349.600.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	10	10		10		10		10		10			
2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				1.068.000.000		1.068.000.000		1.068.000.000		1.068.000.000		1.068.000.000		
Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	10	10	1.068.000.000	10	1.068.000.000	10	1.068.000.000	10	1.068.000.000	10	1.068.000.000		
2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				1.281.600.000		1.281.600.000		1.281.600.000		1.281.600.000		1.281.600.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	10	10	1.281.600.000	10	1.281.600.000	10	1.281.600.000	10	1.281.600.000	10	1.281.600.000		
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				369.875.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				369.875.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Kalurahan yang melaksanakan reformasi kalurahan dengan kategori baik	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Kalurahan dengan Kategori Baik (%)	70,83	84,72	369.875.000	91,67	300.000.000	98,61	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	2.08.2.14.2.13.01. 0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				369.875.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan dalam pelaksanaan reformasi kalurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kema ntren dan Kalurahan/Kelura han yang Didampingi (Dokumen)	3	5	369.875.000	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000		
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				369.875.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	3	5	369.875.000	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000		

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menetapkan sejumlah subkegiatan prioritas sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat kelembagaan kalurahan, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui pendekatan pembangunan keluarga yang terencana. Subkegiatan prioritas difokuskan pada sebagaimana tersebut dalam tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.3 Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1	2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			2.13.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			2.13.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			2.13.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			2.13.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			2.13.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
			2.13.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			2.13.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			2.13.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			2.13.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			2.13.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			2.13.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			2.13.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			2.13.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			2.13.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			2.13.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			2.13.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
			2.13.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			2.13.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			2.13.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kanto	
			2.13.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			2.13.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			2.13.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			2.13.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			2.13.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			2.13.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			2.13.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
			2.13.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			2.13.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			2.13.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			2.13.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			2.13.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			2.13.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			2.13.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
			2.13.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			2.13.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			2.13.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2	2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Cakupan Kalurahan yang melaksanakan kerjasama antar kalurahan	2.13.03.2.01 - Fasilitas Kerja Sama antar Desa	
			2.13.03.2.01.0001 - Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	
3	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kalurahan yang mendapatkan fasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
		Kalurahan yang mendapatkan fasilitasi dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset kalurahan	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
		Kalurahan yang mendapatkan fasilitasi dalam penyelenggaraan administrasi	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
		kalurahan	2.13.04.2.01.0001 - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
		Kalurahan yang mendapatkan fasilitasi dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset kalurahan	2.13.04.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
			2.13.04.2.01.0004 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
		Kalurahan yang mendapatkan fasilitasi dalam penyelenggaraan administrasi kalurahan	2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
			2.13.04.2.01.0007 - Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	
		Kalurahan yang mendapatkan fasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat	2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	
		Kalurahan yang mendapatkan fasilitasi dalam penyelenggaraan administrasi kalurahan	2.13.04.2.01.0009 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	
			2.13.04.2.01.0010 - Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
		Kalurahan yang mendapatkan fasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat	2.13.04.2.01.0011 - Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	
		Kalurahan yang mendapatkan fasilitasi dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset kalurahan	2.13.04.2.01.0013 - Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	
		Kalurahan yang mendapatkan fasilitasi dalam	2.13.04.2.01.0014 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
		penyelenggaraan administrasi kalurahan	2.13.04.2.01.0016 - Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	
		Kalurahan yang mendapatkan fasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat	2.13.04.2.01.0018 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	
4	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya kapasitas Lembaga kemasyarakatan kalurahan	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
			2.13.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
			2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
			2.13.05.2.01.0008 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	
			2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
5	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Seluruh Wanita memenuhi ketentuan Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dalam melaksanakan perkawinan	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
			2.14.02.2.01.0027 - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	
			2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	
			2.14.02.2.02.0011 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	
			2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
			2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	
			2.14.02.2.02.0027 - Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
6	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Menurunnya angka unmet need	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
			2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	
			2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
			2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
			2.14.03.2.01.0013 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	
			2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
			2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
			2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
			2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
			2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
			2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
			2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
			2.14.03.2.03.0011 - Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	
			2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
			2.14.03.2.04.0005 - Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	
			2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
7	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA	Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
	SEJAHTERA (KS)	mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	
			2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
			2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
			2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
8	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	Kalurahan yang melaksanakan reformasi kalurahan dengan	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
	URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	kategori baik	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi hasil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas secara terukur.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun untuk menggambarkan hasil utama yang ingin dicapai dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, pengendalian penduduk, serta penyelenggaraan program keluarga berencana yang berkelanjutan. IKU ini tidak hanya mencerminkan pencapaian target kinerja, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam pengambilan keputusan, pengendalian, evaluasi, dan akuntabilitas publik. Secara umum, Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tersebut dalam tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2.08.2.14.2.13.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
2	Indeks Desa	%	0,855	0,865	0,875	0,885	0,895	8,905	
3	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jiwa	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	
4	Persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga yang Aktif Melaksanakan Kegiatan	%	15,34	16,34	17,34	18,34	19,34	20,34	
5	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR	%	71,15	71,2	71,25	71,3	71,35	71,4	
6	Persentase Desa Mandiri	%	97,22	97,92	98,61	99,31	100	100	
7	Persentase Kalurahan yang Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	

Adapun yang dimaksud dalam indikator dari masing masing indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

- Indeks Desa

Indikator Kinerja Utama "Indeks Desa" merupakan salah satu ukuran strategis yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengukur tingkat kinerja pemerintahan kalurahan dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Tata kelola pemerintahan kalurahan yang dimaksud mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas pelayanan publik, serta kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan kalurahan. Indikator ini mencerminkan sejauh mana kalurahan mampu menyelenggarakan pemerintahan secara profesional, responsif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Indeks desa didapatkan berdasarkan hasil penilaian enam indikator (layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan desa), yang dirilis oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

Indeks desa memiliki kriteria sebagai berikut

- Mandiri $79,63\% \leq ID \leq 100\%$
- Maju $69,35\% \leq ID \leq 79,62\%$
- Berkembang $57,39\% \leq ID \leq 69,34\%$
- Tertinggal $49,49\% \leq ID \leq 57,38\%$
- Sangat Tertinggal $0\% \leq ID \leq 49,48\%$

Dengan adanya indikator ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendorong seluruh kalurahan untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas tata kelola, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan kalurahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Selain itu, indikator ini juga menjadi alat pemantauan terhadap efektivitas program pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh dinas. Peningkatan nilai persentase tata kelola pemerintahan kalurahan setiap tahunnya menjadi bukti nyata dari komitmen bersama antara pemerintah daerah, aparat kalurahan, dan masyarakat dalam membangun desa yang mandiri dan berdaya saing.

- Total Fertility Rate (TFR).

Indikator Kinerja Utama (IKU) Total Fertility Rate (TFR) merupakan salah satu indikator demografi yang sangat strategis dan digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mengukur rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduktifnya (usia 15–49 tahun), dengan asumsi bahwa ia mengalami pola fertilitas seperti yang berlaku pada tahun tertentu.

Pengukuran TFR mencerminkan hasil dari berbagai intervensi kebijakan kependudukan, khususnya dalam program pengendalian kelahiran dan peningkatan akses pelayanan keluarga berencana. Penurunan TFR menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam

menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan daya dukung pembangunan.

Tujuan dari pengukuran indikator ini antara lain:

- Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk untuk mencegah beban demografis yang terlalu tinggi;
- Mempertahankan angka kelahiran total mengingat target nasional 2,1 sedangkan capaian Dinas pada 2 tahun terakhir tercatat di angka 1,9;
- Mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera, yang memiliki kualitas hidup lebih baik;
- Mendukung pencapaian bonus demografi dengan memastikan bahwa jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibanding usia non-produktif.

Capaian TFR yang ideal (sekitar 2,1) menandakan bahwa populasi berada dalam kondisi seimbang secara alami (replacement level fertility). Oleh karena itu, indikator ini menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program Bangga Kencana, serta menjadi salah satu acuan utama dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang. Melalui berbagai upaya seperti peningkatan cakupan peserta KB aktif, penyuluhan dan edukasi tentang kesehatan reproduksi, pelayanan KB yang berkualitas dan terjangkau, serta pelibatan masyarakat dan tokoh-tokoh strategis, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkomitmen untuk menurunkan TFR secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan target nasional maupun daerah.

Dengan terus memantau dan mengendalikan TFR, DPMKP2KB berperan penting dalam menciptakan struktur penduduk yang sehat, seimbang, dan berdaya saing, demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

- Persentase Kalurahan yang Menyusun LPPKal Tepat Waktu

Indikator Kinerja Utama "Persentase Kalurahan yang Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) Tepat Waktu" merupakan salah satu ukuran penting yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk menilai kepatuhan serta kapasitas administrasi pemerintahan kalurahan dalam menyampaikan laporan tahunan secara tertib, sesuai ketentuan yang berlaku. LPPKal adalah laporan tahunan kepala kalurahan kepada bupati/walikota melalui camat yang berisi penyelenggaraan seluruh aspek pemerintahan kalurahan selama satu tahun anggaran. Kewajiban penyusunan LPPKal diatur dalam regulasi perundang-undangan sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa atau kalurahan.

Indikator Kinerja Utama ini mengukur persentase kalurahan yang berhasil menyusun dan menyampaikan LPPKal paling lambat tanggal 31 Maret tahun berjalan, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan Rumusan :

$$\frac{\text{Jumlah Kalurahan dengan LPPKal tepat Waktu}}{\text{Jumlah Kalurahan}} \times 100$$

Adapun yang menjadi tujuan utama dari indikator ini adalah:

- Mendorong tertib administrasi pemerintahan kalurahan;
- Menumbuhkan budaya akuntabilitas dan evaluasi kinerja di tingkat kalurahan;

- Menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan secara sistematis;
- Menyediakan data dan informasi yang sah sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan berbasis desa.

Capaian indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan kesiapan kalurahan dalam menyelenggarakan pemerintahan secara tertib, serta memperlihatkan efektivitas peran pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terhadap pemerintah kalurahan. Melalui peningkatan capaian IKU ini dari tahun ke tahun, DPMKP2KB berkomitmen untuk terus memperkuat kapasitas aparatur kalurahan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan kalurahan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

- Persentase Desa Mandiri

Indikator Kinerja Utama “Persentase Desa Mandiri” merupakan salah satu tolok ukur penting yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mengevaluasi capaian pembangunan dan kemandirian desa dalam berbagai aspek.

Desa Mandiri adalah desa yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan secara mandiri, ditandai dengan kekuatan dalam aspek sosial, ekonomi, dan ekologi, serta didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik.

Indikator Kinerja Utama “Persentase Desa Mandiri” ini dihitung berdasarkan persentase desa yang telah berstatus mandiri dibandingkan dengan total desa yang ada di wilayah administratif. Capaian indikator ini mencerminkan efektivitas intervensi kebijakan, program pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan terhadap pemerintahan desa dan kelembagaan lokal yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tujuan strategis dari pengukuran ini meliputi:

- Mendorong percepatan pembangunan desa secara berkelanjutan;
- Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan;
- Memperluas akses masyarakat desa terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan sosial;
- Mengurangi ketimpangan antar wilayah melalui penguatan kemandirian desa;
- Mewujudkan desa sebagai subjek pembangunan, bukan semata objek program.

Peningkatan jumlah desa mandiri dari tahun ke tahun menjadi salah satu bukti keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat desa serta sinergi antara pemerintah daerah, kalurahan, dan masyarakat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkomitmen untuk terus memperkuat pembinaan, fasilitasi, dan pendampingan terhadap desa-desa berkembang dan maju agar dapat mencapai status mandiri secara berkelanjutan. Melalui indikator ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana tidak hanya menilai capaian kuantitatif, tetapi juga mendorong perubahan kualitatif dalam kehidupan masyarakat desa, menuju desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

- Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)

Indikator Kinerja Utama "Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)" merupakan salah satu indikator strategis yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengukur efektivitas pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) modern di wilayah kerja dinas. Penggunaan alat kontrasepsi modern tidak hanya berkaitan dengan pengendalian laju pertumbuhan penduduk, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup keluarga, kesehatan reproduksi, dan ketahanan keluarga. Alat kontrasepsi modern mencakup berbagai metode yang terbukti secara klinis efektif dan aman, seperti pil, suntik, implan, IUD, kondom, dan metode mantap (MOW/MOP).

IKU ini diukur melalui persentase pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta aktif KB dengan menggunakan metode kontrasepsi modern dibandingkan dengan total jumlah PUS yang terdata. Semakin tinggi persentase ini, semakin menunjukkan keberhasilan pelayanan KB dalam menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan kontrasepsi yang berkualitas.

Adapun tujuan utama dari pengukuran indikator ini adalah:

- Meningkatkan akses dan pemanfaatan alat kontrasepsi modern di seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah rentan dan terpencil;
- Menekan angka kelahiran tidak direncanakan dan menurunkan angka kehamilan berisiko;
- Mendukung pencapaian target pembangunan kependudukan dan keluarga berencana nasional;
- Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam merencanakan keluarga yang sehat dan sejahtera.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan layanan KB yang ramah, mudah diakses, dan berkualitas, melalui kerja sama lintas sektor, peningkatan kapasitas tenaga lini lapangan, penguatan edukasi dan penyuluhan, serta ketersediaan logistik kontrasepsi secara merata. Peningkatan persentase pemakaian alat kontrasepsi modern juga menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah daerah dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan daya dukung pembangunan, menuju masyarakat yang sehat, produktif, dan berkualitas.

- Persentase Kelompok Kegiatan yang Aktif Melaksanakan Kegiatan

Indikator Kinerja Utama (IKU) "Persentase Kelompok Kegiatan yang Aktif Melaksanakan Kegiatan" merupakan ukuran strategis yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk menilai sejauh mana efektivitas pembinaan dan pemberdayaan kelompok kegiatan di masyarakat, khususnya dalam mendukung

Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Kelompok kegiatan yang dimaksud meliputi antara lain:

- Bina Keluarga Balita (BKB)
- Bina Keluarga Remaja (BKR)
- Bina Keluarga Lansia (BKL)
- Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)
- Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
- Kelompok Kesejahteraan Sosial dan Posyandu

Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah kelompok kegiatan yang secara aktif dan rutin menyelenggarakan pertemuan, penyuluhan, pelatihan, atau kegiatan pemberdayaan lainnya dalam kurun waktu tertentu, dibandingkan dengan total jumlah kelompok yang terbentuk dan terdaftar.

Tujuan dari pengukuran IKU ini antara lain:

- Menilai keberlangsungan dan keberfungsian kelompok kegiatan sebagai motor penggerak pembangunan keluarga di tingkat akar rumput;
- Menjadi dasar dalam pembinaan berkelanjutan, baik dari sisi pendampingan teknis maupun fasilitasi sarana dan prasarana;
- Mendorong terwujudnya keluarga yang tangguh, sehat, mandiri, dan produktif melalui kegiatan yang terstruktur dan berkelanjutan;
- Mengidentifikasi wilayah atau kelompok yang memerlukan intervensi lebih lanjut dari pemerintah daerah.

Tingginya persentase kelompok yang aktif melaksanakan kegiatan menunjukkan keberhasilan strategi pembinaan dan peran aktif masyarakat dalam memperkuat ketahanan keluarga. Hal ini sekaligus menggambarkan terciptanya ekosistem sosial yang partisipatif dan inklusif dalam pembangunan berbasis keluarga dan komunitas. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terus berupaya memperkuat kapasitas kelompok kegiatan melalui pelatihan kader, fasilitasi kegiatan, penyediaan media edukatif, serta pengembangan inovasi berbasis potensi lokal. Sinergi antara kader, pemerintah kalurahan, dan lintas sektor menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas kelompok yang aktif.

- Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)

Indikator Kinerja Utama "Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)" merupakan salah satu indikator strategis yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengukur efektivitas pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) modern di wilayah kerja dinas. Penggunaan alat kontrasepsi modern tidak hanya berkaitan dengan pengendalian laju pertumbuhan penduduk, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup keluarga, kesehatan reproduksi, dan ketahanan keluarga. Alat kontrasepsi modern mencakup berbagai metode yang terbukti secara klinis efektif dan aman, seperti pil, suntik, implan, IUD, kondom, dan metode mantap (MOW/MOP).

IKU ini diukur melalui persentase pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta aktif KB dengan menggunakan metode kontrasepsi modern dibandingkan dengan total jumlah PUS yang terdata. Semakin tinggi persentase ini, semakin menunjukkan keberhasilan pelayanan KB dalam menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan kontrasepsi yang berkualitas.

Adapun tujuan utama dari pengukuran indikator ini adalah:

- Meningkatkan akses dan pemanfaatan alat kontrasepsi modern di seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah rentan dan terpencil;
- Menekan angka kelahiran tidak direncanakan dan menurunkan angka kehamilan berisiko;
- Mendukung pencapaian target pembangunan kependudukan dan keluarga berencana nasional;
- Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam merencanakan keluarga yang sehat dan sejahtera.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan layanan KB yang ramah, mudah diakses, dan berkualitas, melalui kerja sama lintas sektor, peningkatan kapasitas tenaga lini lapangan, penguatan edukasi dan penyuluhan, serta ketersediaan logistik kontrasepsi secara merata. Peningkatan persentase pemakaian alat kontrasepsi modern juga menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah daerah dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan daya dukung pembangunan, menuju masyarakat yang sehat, produktif, dan berkualitas.

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Sebagai perangkat daerah yang memiliki mandat strategis dalam pembangunan masyarakat Kalurahan dan pengendalian kependudukan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menetapkan sejumlah Indikator Kinerja Kunci (IKK) guna memastikan efektivitas pelaksanaan program, efisiensi penggunaan sumber daya, serta relevansi kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat. Indikator kunci kinerja yang digunakan mencerminkan outcome dan output strategis dinas dalam mendukung pencapaian visi misi daerah. Adapun Indikator Kinerja Kunci tersebut sebagaimana terangkum dalam Tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	positif	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase pengentasan desa tertinggal	positif	%	100	100	100	100	100	100	
4	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
5	TFR (Angka Kelahiran Total)	positif	Jiwa	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	
6	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR	positif	%	71.15	71.2	71.25	71.3	71.35	71.4	
7	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	negatif	%	9.35	9.3	9.25	9.2	9.15	9.1	

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025–2029 merupakan wujud komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dokumen ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan, sekaligus sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja secara periodik.

Renstra ini disusun berdasarkan analisis terhadap isu-isu strategis pembangunan, evaluasi atas capaian Renstra periode sebelumnya, serta mempertimbangkan arah kebijakan nasional, provinsi, dan prioritas pembangunan daerah. Fokus utama dari Renstra ini adalah penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah kalurahan, pengendalian laju pertumbuhan penduduk, serta peningkatan kualitas keluarga melalui program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana).

Diharapkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah dan terukur dalam lima tahun ke depan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan masyarakat yang berdaya, kalurahan yang mandiri, serta keluarga yang berkualitas.

Akhirnya, penyusunan dokumen ini tidak lepas dari dukungan dan masukan berbagai pihak, baik dari pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengucapkan terima kasih atas segala kontribusi yang telah diberikan. Semoga dokumen Renstra ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama lima tahun ke depan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.



KEPALA,

SUJARWO



BUPATI GUNUNGKIDUL

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

META DATA INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT													
2.08.2.14.2.13.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana														
XXI	ASPEK DAYA SAING DAERAH													
1	Indeks Desa	Indeks	Indeks desa memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi desa, yang mencakup berbagai aspek layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan desa. Indeks desa adalah sebuah indikator tunggal yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa di Indonesia.	Indeks desa didapatkan berdasarkan hasil penilaian enam indikator (layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan desa), yang dirilis oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Indeks desa memiliki kriteria sebagai berikut Mandiri 79,63% ≤ ID ≤ 100% Maju 69,35% ≤ ID ≤ 79,62% Berkembang 57,39% ≤ ID ≤ 69,34% Tertinggal 49,49% ≤ ID ≤ 57,38% Sangat Tertinggal 0% ≤ ID ≤ 49,48%	Indeks desa bernilai antara 0 - 1 dan bermakna positif. Nilai Indeks desa yang semakin tinggi menunjukkan tingkat kemajuan dan kemandirian desa semakin baik.	Indeks Desa yang dirilis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia	-	0.855	0.865	0.875	0.885	0.895	0.905	
XXII	ASPEK PELAYANAN UMUM													
2	Persentase Desa Mandiri	%	Mengukur presentase kalurahan berstatus mandiri di Kabupaten Gunungkidul	Jumlah kalurahan bersatatus mandiri : Jumlah kalurahan seluruhnya x 100%	Semakin tinggi persentase desa mandiri, menunjukkan semakin banyak desa berstatus mandiri di Kabupaten Gunungkidul	DPMKP2KB	87.5	97.22	97.92	98.61	99.31	100	100	
3	Persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga yang Aktif Melaksanakan Kegiatan	%	Mengukur keaktifan kelompok kegiatan ketahanan keluarga, yang teridir dari Bina Keluarga Balita,Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga yang Aktif Melaksanakan Kegiatan : Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga seluruhnya x 100%	Semakin tinggi capaiannya, menunjukkan semakin banyak Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga yang Aktif Melaksanakan Kegiatan	DPMKP2KB	15.34	15.34	16.34	17.34	18.34	19.34	20.34	
4	Persentase Kalurahan yang Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) Tepat Waktu	%	Mengukur Ketepatan waktu kalurahan dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal)	Jumlah Kalurahan yang menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) tepat waktu : Jumlah Kalurahan seluruhnya x 100%	Semakin tinggi capaiannya, menunjukkan semakin banyak kalurahan yang telah menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) tepat waktu	DPMKP2KB	100	100	100	100	100	100	100	

XXIII	INDIKATOR KINERJA KUNCI													
NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
AA	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	Mengukur perkembangan desa yang mengalami peningkatan status menjadi desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun atau Indek Desa per tahun : Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) x 100%	Semakin tinggi capaiannya, menunjukkan semakin banyak kalurahan berstatus berkembang naik menjadi kalurahan berstatus mandiri	DPMKP2KB	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	Mengukur persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun atau Indek Desa per tahun : Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) x 100%	Semakin tinggi capaiannya, menunjukkan semakin banyak kalurahan berstatus tertinggal naik menjadi kalurahan berstatus berkembang.	DPMKP2KB	100	100	100	100	100	100	100	
AB	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jiwa	Mengukur angka kelahiran total (Total Fertility Rate)	Banyaknya kelahiran perempuan umur 15-49 tahun selama periode tertentu : Jumlah penduduk perempuan usia 15-49 taun pada periode yang sama x 100% Data dirilis dari Kemendukbangga	TFR sebesar 2,1 dianggap sebagai batas penggantian populasi. Artinya, jika TFR sama dengan atau lebih tinggi dari 2,1, maka populasi tersebut cenderung stabil atau tumbuh. Jika TFR di bawah 2,1, maka populasi cenderung menyusut	Kemendukbangga	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR	%	Mengukur tingkat pemakaian kontrasepsi modern	Jumlah peserta KB Aktif Modern : Jumlah Pasangan Usia Subur x 100%	Semakin tinggi mCPR, menunjukkan semakin banyak pasangan usia subur yang menggunakan alat konrasepsi modern	DPMKP2KB	71.12	71.15	71.20	71.25	71.30	71.35	71.40	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	Unmet need Mengukur persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani : Jumlah Pasangan Usia Subur x 100%	Unmet need bernilai antara 0% - 100%, dan bermakna negatif. Semakin rendah capaian unmet need menunjukkan bahwa semakin banyak pasangan usia subur yang ber-KB	DPMKP2KB	9.4	9.35	9.3	9.25	9.2	9.15	9.1	

META DATA PROGRAM
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	BASELINE 2024	TARGET					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA												
Cakupan Kalurahan yang melaksanakan kerjasama antar kalurahan	Persentase Kalurahan Yang Melaksanakan Kerjasama Antar Desa (%)	Merupakan gambaran capaian kalurahan yang telah melaksanakan kerjasama antar desa di kabupaten Gunungkidul	Jumlah Kalurahan yang telah melaksanakan Kerjasama antar desa : Jumlah Kalurahan seluruhnya x 100%	Dengan terjalinya kerjasama antar Desa menunjukan kemampuan desa dalam hal peningkatan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan penguatan solidaritas di antara masyarakat kalurahan yang melaksanakan kerjasama	DPMKP2KB	100	100	100	100	100	100	100
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA												
Kalurahan yang mendapatkan fasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat	Persentase kalurahan yang mendapatkan fasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat (%)	Merupakan gambaran prosentase kalurahan yang telah mendapatakn fasilitasi dalam peremberdayaan masyarakat di kabupaten Gunungkidul	Jumlah kalurahan yang mendapatkan fasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat : Jumlah Kalurahan seluruhnya x 100%	Dengan terfasilitasinya Kalurahan dalam pemberdayaan masyarakat di harapkan mampu meningkatkan semangat dan kesadaran dalam meningkatkan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan kelembagaan masyarakat	DPMKP2KB	100	100	100	100	100	100	100
Kalurahan yang mendapatkan fasilitasi dalam penyelenggaraan administrasi kalurahan	Persentase Kalurahan Yang Mendapatkan Fasilitasi Dalam Penyelenggaraan Administrasi Kalurahan (%)	Merupakan gambaran prosentase kalurahan yang telah mendapatakn fasilitasi dalam peremberdayaan masyarakat di kabupaten Gunungkidul	Jumlah Kalurahan Yang Mendapatkan Fasilitasi Dalam Penyelenggaraan Administrasi Kalurahan : Jumlah Kalurahan seluruhnya x 100%	Dengan terfasilitasinya Kalurahan dalam Penyelenggaraan Administrsi maka di harapkan mampu meningkatkan pelayanan admistratif kepada masyakatat secara cepat, tepat, baik, dan akuntabel	DPMKP2KB	100	100	100	100	100	100	100
Kalurahan yang mendapatkan fasilitasi dalam penyusunan perencaaan, pengelolaan keuangan dan aset kalurahan	Persentase kalurahan yang mendapatkan fasilitasi penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset kalurahan (%)	Merupakan gambaran prosentase kalurahan yang telah mendapatakn fasilitasi dalam peremberdayaan masyarakat di kabupaten Gunungkidul	Jumlah kalurahan yang mendapatkan fasilitasi penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset kalurahan x Jumlah kalurahan seluruhnya x 100%	Dengan terfasilitasinya Kalurahan dalam perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset di harapkan mampu meningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam perencaaan, pembangunan, pengelolaan keuangan serta pengelolaan aset di kalurahan	DPMKP2KB	100	100	100	100	100	100	100

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	BASELINE 2024	TARGET					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT												
Meningkatnya kapasitas Lembaga kemasyarakatan kalurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Yang Dibina (%)	Menunjukan persentase lembaga kemasyarakatan Kalurahan yang telah mendapatkan pembinaan	realisasi lembaga desa yang dibina : target lembaga desa yang akan dibina x 100%	dengan terlaksananya pembinaan diharapkan mampu/ menunjukan peningkatan kapasitas kelembagaan serta peran masing masing dalam pemberdayaan lembaga kemasyakatan kalurahan	DPMKP2KB	100	100	100	100	100	100	100
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK												
Seluruh Wanita memenuhi ketentuan Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dalam melaksanakan perkawinan	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Seluruh Wanita Usia 25-49 Tahun (Tahun)	Usia tengah (median) dari kelompok perempuan yang pernah menikah atau sedang menikah dalam rentang usia 25-49 tahun	Nilai tengah dari urutan usia kawin pertama pada perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun pada periode tertentu	BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) menetapkan target MUKP perempuan di Indonesia adalah 22 tahun pada tahun 2022,jika MUKP dibawah 22 tahun, maka berpotensi pada resiko kesehatan reproduksi dan kesejahteraan keluarga.	BKKBN	21	22	22.2	22.4	22.6	22.8	23
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)												
Menurunya angka unmet need	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	Unmet need Mengukur persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani : Jumlah Pasangan Usia Subur x 100%	Unmet need bernilai antara 0% - 100%, dan bermakna negatif. Semakin rendah capaian unmet need menunjukkan bahwa semakin banyak pasangan usia subur yang ber-KB	DPMKP2KB	9.4	9.35	9.3	9.25	9.2	9.15	9.1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	BASELINE 2024	TARGET					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)												
Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	Mengukur keikutsertaan keluarga dalam kelompok kegiatan ketahan keluarga yang terdiri dari Bina Keluarga Balita,Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga : Jumlah Keluarga seluruhnya x 100%	Semakin tinggi capaiannya menunjukkan semakin banyak keluarga Yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	DPMKP2KB	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1